



BAB V

TEMUAN DATA DAN ANALISIS DATA

BAB V

TEMUAN DATA DAN ANALISIS DATA

5.1. Mukhtar Lirboyo: Konflik dan Isu Politik Uang (*Money Politics*)

Pada saat menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, persaingan antara kubu Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj semakin seru. Bersamaan dengan itu, berbagai isu negatif pun bermunculan. Seperti isu *money politics* antar kandidat, adanya isu-isu yang melemahkan posisi Hasyim Muzadi, seperti tidak adanya nasab kiai. Seringnya Said Aqiel Siradj datang ke gereja-gereja, dan soal kerja panitia, baik pusat maupun daerah yang sudah dimasuki kepentingan masing-masing kubu.

Mengenai masalah kerja panitia ini, kubu Said Aqiel Siradj dikabarkan telah memanfaatkan panitia pusat untuk kepentingan pencalonannya. Begitu juga sebaliknya, Hasyim Muzadi yang kebetulan PWNU Jatim dikabarkan telah memanfaatkan panitia lokal yang notabene dari Jatim. Akibat dari isu itu, panitia lokal dan panitia pusat terkesan saling curiga dan tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Sehingga banyak peserta Mukhtar NU ke-30 yang mengeluh atas kejadian tersebut.

Bahkan, akibat dari kejadian tersebut, pengamat NU asal Jepang Mitsuo Nakamura menilai bahwa Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim adalah mukhtar yang paling kacau. (Jawa Pos, *Nakamura: Mukhtar Paling Kacau*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

5.1.1. Isu *Money Politics* Antar Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

Isu *money politics* mewarnai Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Ada dua kandidat kuat yang disebut-sebut terlibat dalam praktek pemberian dana maupun fasilitas kepada para peserta muktamar agar mendukung dirinya. Mereka adalah Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj.

Hasyim, misalnya diisukan telah menyiapkan tiket pesawat kepada *muktamirin* dari luar Jawa dan menjanjikan beberapa fasilitas yang cukup menggiurkan. Sebelumnya, ia juga diisukan telah menyiapkan perangkat komputer untuk diberikan kepada beberapa cabang di luar Jawa yang menginginkannya. Bahkan, yang menghembuskan isu itu adalah salah seorang ketua umum partai yang selama ini selalu berseberangan dengan Gus Dur.

Sedangkan Ketua Panitia Nasional Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim Said Aqiel Siradj, juga tidak lepas dari isu *money politics*. Terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas untuk kebutuhan muktamar. Misalnya, mengedarkan buku secara gratis, menyediakan kaus bergambar dirinya, dan mengedarkan stiker.

Bahkan, beberapa peserta menengarai, Said Aqiel telah “bermain” dengan sengaja memperlambat materi dan fasilitas untuk peserta muktamar.

Menurut salah seorang peserta muktamar dari Jatim, terlambatnya tas dan materi muktamar, sengaja dipermainkan oleh Panitia Nasional Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri. Mereka sengaja menunggu buku Said Aqiel untuk bisa diikutkan bersama materi muktamar.

Pertarungan para kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004, sebenarnya sudah berjalan jauh sebelum Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim digelar. Hasyim Muzadi, misalnya, telah kampanye di Jakarta sepekan sebelum mereka memunculkan buku “Membangaun NU Pasca Gus Dur”. Isinya, tidak lain pemikiran-pemikiran Cak Hasyim, mengenai bagaimana membangun masa depan NU. Jadi, tampak sekali Cak Hasyim tetap maju dalam pencalonannya.

Peluncuran buku itu juga dihadiri Fuad Bawazier, Ahmad Sumargono, dan tokoh Poros Tengah. Konon, naiknya Hasyim Muzadi memang diinginkan Poros Tengah karena posisi Hasyim Muzadi di Jawa Timur sangat membantu tumbuh suburnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jika Hasyim Muzadi naik menjadi Ketua Umum PBNU, diharapkan aliansi antara partai yang didirikan Gus Dur itu dan Poros Tengah akan menguat. Tidak hanya Fuad Bawazier yang dikenal jago lobi dari Poros Tengah yang menyokong, tetapi juga mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman.

Selain itu, Hasyim Muzadi juga mempunyai tim sukses yang kuat. Para figur yang tergabung dalam tim ini, seperti Matori Abdul Djalil, Effendy Choiri, dan Deny Danuri dari Poros Tengah yang juga dekat dengan Fuad Bawazier dan Amien Rais.

Lain lagi, basis dukungan bagi Said Aqiel Siradj. Dosen IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu *diback-up* kalangan muda NU yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pemuda dan Pelajar NU (IPPNU), dan sebagainya. Para panitia nasional muktamar yang berasal dari Jakarta disebut-sebut pula berada di belakang Said Aqiel Siradj.

Para pendukung setiap kandidat mempunyai markas sendiri-sendiri di Kediri. Tim sukses Hasyim Muzadi menginap di Hotel Safari Jalan Welirang No. 19. Sementara, tim sukses Said Aqiel Siradj tinggal di Jalan Sahardjo No. 10.

Semula, perang kandidat pra muktamar dilakukan dengan gaya klasik dan sederhana. Mereka hanya membagi-bagi buku, kaus, dan berbagai atribut lainnya. Tetapi, ketika memasuki hari pertama Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, 20 Nopember 1999, persaingan memanas. Manuver politik dilakukan silih berganti. Bahkan, rumor politik suap berembus. Persaingan makin sengit ketika setiap kandidat mencari dukungan ke tokoh yang paling disegani di kalangan ulama NU Kiai Abdullah Faqih, dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya telah keluar dari tradisi kaum *nahdliyin*. Mereka mengedarkan selebaran yang sifatnya mengejek dan menghina calon lain. Bunyi salah satu selebaran itu antara lain: "Pilihlah pemimpin NU yang tidak pernah masuk ke Gereja dan tidak pernah berbau Wahabi", di dalamnya terpampang foto Said Aqiel Siradj. Dan, di bagian lain tertulis tanda tangan dan komentar pembina Pesantren Lirboyo-Kediri, Kiai Maksud Jauhari. "Said Aqiel Siradj itu murid terkutuk di sini", tulis Kiai Maksud Jauhari. Terang saja, hal itu membuat pendukung Said Aqiel Siradj mencak-mencak.

Karena itulah, para kiai sepuh NU segera bertindak. Sejumlah pertemuan tertutup mereka lakukan untuk membahas persaingan tidak sehat itu. Bahkan, mereka sempat mempertimbangkan Mustofa Bisri sebagai calon kuda hitam. Ini sebagai upaya meredakan ketegangan kubu Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj.

Tetapi, rupanya, perang antar kubu itu tidak juga berhenti. Bahkan, rumor politik suap kian kencang. Isu ini bermula dari *stand* mobil Timor. Pasalnya, anjungan mobil Timor yang berada di belakang arena Muktamar NU ke-30 itu “menghadiahkan” 18 mobil Timor kepada para kiai. Mobil dengan nomor khusus itu lantas mereka pakai selama Muktamar NU ke-30. Hasyim Muzadi yang dituding berada di balik pemberian hadiah itu mengelak.

Kendati begitu, memang ada beberapa perusahaan ikut “mensponsori” Muktamar NU ke-30. Kiai Hasyim Muzadi, misalnya, dituduh mendapat dukungan dana dari PT. Maspion dan panitia di Lirboyo-Kediri mendapat sumbangan yang cukup besar dari Pabrik Rokok Keretek Gudang Garam, Kediri. (FORUM Keadilan: *Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyin*, No. 35, 5 Desember 1999, hal. 14).

Adapun isu-isu negatif yang berkembang pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim antar kandidat kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Isu-Isu Negatif Yang Berkembang Pada Muktamar NU Ke-30
Di Lirboyo-Kediri-Jatim Antar Kandidat Kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004

No.	Nama	Isu-Isu Negatif Yang Berkembang Pada Muktamar NU Ke-30 Di Lirboyo-Kediri-Jatim Antar Kuat Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

1.	Hasyim Muzadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan tiket pesawat kepada <i>muktamirin</i> dari luar Jawa dan menjanjikan beberapa fasilitas yang cukup menggiurkan. b. Memanfaatkan panitia lokal Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim dari Jatim. c. Menyiapkan perangkat komputer untuk cabang di luar Jawa. d. Memberikan uang transportasi kepada <i>muktamirin</i> dari Irian Jaya yang ibu dan istrinya meninggal dunia pada saat Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim berlangsung. e. Memberikan 18 mobil Timor pada kiai sepuh. f. Mendapat dukungan dana dari PT. Maspion dan Pabrik Rokok Gudang Garam Kediri Jawa Timur. g. Tidak adanya nasab kiai.
2.	Said Aqiel Siradj	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengedarkan buku secara gratis b. Menyediakan kaus bergambar dirinya. c. Mengedarkan stiker. d. Memperlambat materi dan fasilitas <i>muktamirin</i>, seperti: terlambatnya tas. e. Memanfaatkan panitia pusat Muktamar NU ke-30.

Sumber:

1. **Jawa Pos**, *Nakamura: Muktamar Paling Kacau*, 23 Nopember 1999, hal. 3.
2. **Jawa Pos**, *Isu Money Politics Goyang Dua Kandidat*, 22 Nopember 1999, hal. 2.
3. **Jawa Pos**, *Isu Money Politics Disesalkan*, 23 Nopember 1999, hal. 2.
4. **FORUM Keadilan**: *Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyin*, No. 35, 5 Desember 1999, hal. 14.

Terhadap tuduhan itu, tentu saja kedua kandidat itu membantahnya. Hasyim Muzadi, misalnya, menuding tuduhan itu sangat tidak berdasar dan terkesan dicari-cari. Ia meminta agar yang mengisukan *money politics* seperti itu menunjukkan atau membuktikan, cabang mana yang telah diberi komputer atau dijanjikan tiket untuk pulang.

Menurut Hasyim, saya kira mereka (pengurus cabang) tidak bodoh. Kalau ada yang bagi-bagi uang atau tiket, misalnya, tentu dengan senang hati mereka akan menerima. Namun, belum tentu mereka akan memilih kandidat yang telah

memberikan fasilitas itu. Jadi, itu merupakan langkah yang bodoh apabila kandidat melakukan seperti itu.

Sementara itu, A. Gufron, salah seorang tim sukses Said Aqiel, juga membantah adanya isu *money politics* itu. Kandidat yang dijagokannya itu tidak mungkin melakukan perbuatan amoral. Akan tetapi, kalau membagi-bagikan buku, stiker, atau kaus, ia menganggap itu bukan *money politics*. Sebab, hal itu sudah biasa dilakukan dalam acara-acara muktamar. Apalagi, hampir seluruh kandidat melakukan hal seperti itu untuk menyosialisasikan pokok-pokok pikirannya. (Jawa Pos, *Isu Money Politics Goyang Dua Kandidat*, 22 Nopember 1999, hal. 2).

Menghadapi isu *money politics* tersebut, seorang kandidat Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, sangat menyesalkan munculnya pemberitaan tentang isu *money politics*. Baik yang dituduhkan terhadap dirinya maupun kepada kandidat yang lain. Pasalnya, selama ini pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan seperti yang diisukan itu.

Menurut Hasyim Muzadi di hadapan para wartawan tanggal 22 Nopember 1999, bahwa kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang lain tidak akan melakukan hal itu. Karena, mereka bukan orang kaya dan kelasnya bukan biasa membagi-bagikan uang. Akan tetapi, menurut Hasyim Muzadi, saya tidak mengetahui kalau ada orang di belakang mereka.

Menurut Hasyim Muzadi, para kandidat seperti Said Aqiel Siradj, Fadjrul, Gus Mus, Ahmad Bagja maupun Salahuddin Wahid, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *money politics*. Karena membuat diktat saja sampai muktamar

dimulai belum selesai. Lagi pula, *money politics* untuk orang sebanyak peserta muktamar itu memerlukan uang yang besar.

Perlu diketahui, lanjut Hasyim Muzadi, orang NU tidak bisa dilayani dengan *money politics*. Siapa yang melakukan politik uang, sama saja dengan dia menggali lubangnya sendiri. Untuk itu, siapa yang menuduh harus bisa membuktikan bahwa tuduhan itu benar atau tidak bersalah. Kalau tidak, dia harus dituntut balik.

Pada tanggal 22 Nopember 1999 Hasyim Muzadi mengklarifikasi tentang tuduhan terhadap dirinya yang dikatakan telah membagi-bagikan komputer kepada beberapa pengurus cabang NU yang berkunjung ke pondoknya. Bahwa pada saat pengurus cabang NU berkunjung ke pondoknya, mereka melihat banyak komputer di pondoknya, kemudian minta salah satu dari komputer itu. Jadi, menurut Hasyim Muzadi mereka yang minta, bukan saya yang membagi-bagikan komputer.

Hasyim juga menjelaskan kepada wartawan, apakah tindakannya dikatakan *money politics* kalau dia memberikan uang transportasi kepada peserta muktamar dari Irian Jaya yang ibu dan istrinya meninggal dunia secara bergantian, sedangkan dia sangat membutuhkan uang.

Untuk itu, Hasyim Muzadi mengharapkan agar Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim dibersihkan dari isu kotor itu, baik yang dituduhkan kepada dirinya maupun kandidat yang lain. Mengingat, pada dasarnya mereka bersaing di Muktamar NU ke-30 itu bukan untuk kontradiktif, melainkan itu semua bagian dari dinamika dan demokrasi.

Karena, mereka pada akhirnya akan menjadi satu dalam jajaran pengurus PBNU 1999-2004. Sehingga, Hasyim memprotes keras, kalau masih ada media massa yang masih mengisukan hal itu.

Sementara itu, Said Aqiel Siradj juga membantah ketika dikonfirmasi soal tuduhan dirinya melakukan *money politics*. Tampaknya, ia tidak terlalu merisaukan dengan isu yang ditujukan kepadanya itu. (Jawa Pos, *Isu Money Politics Disesalkan*, 23 Nopember 1999, hal. 2).

Karena persaingan semakin tidak terkendali, akhirnya 12 ulama sepuh melakukan pertemuan tertutup lagi. Dalam pertemuan di rumah Kiai Idris, mereka membahas secara intensif trik politik yang dimainkan para tim sukses Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj. Salah satu keputusan dalam pertemuan itu adalah mengajak para kandidat dan *muktamirin* (peserta muktamar) kembali kepada yang *haq* serta bertindak sesuai dengan *akhlakul karimah*.

Para kiai sepuh akhirnya benar-benar menampilkan Kiai Mustofa Bisri sebagai calon alternatif. Kasak-kusuk yang berlebihan dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim itu membuat Kiai Faqih dari Langitan marah karena beberapa kiai terlibat dukung-mendukung.

Sebelumnya skenario sudah ditata rapi. Sudah ada pertemuan pendahuluan antara Gus Dur, Kiai Faqih dan Hasyim Muzadi di Tuban, Oktober setelah Gus Dur menjadi Presiden RI ke-4. Waktu itu sudah ada kesepakatan komposisi Ketua dan Wakil Rais Tanfidziah. "Kiai Sahal Mahfudz dan Hasyim Muzadi sudah diplot sejak di situ.

Walaupun skenario itu terbukti, tidak semua peserta muktamar mendukung Hasyim Muzadi. Soalnya, menurut Malik Madani dari PWNU DI Yogyakarta, bahwa NU di bawah pimpinan Hasyim Muzadi, dikhawatirkan menjadi gerbong pemerintah. Sebab Hasyim Muzadi tidak berani mengatakan “tidak” kepada Gus Dur. (FORUM Keadilan: *Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyin*, No. 35, 5 Desember 1999, hal. 14).

5.2. Perang Pendukung Antar Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

Selain diwarnai perang isu *money politics*, Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim juga diwarnai dengan perang klaim pendukung. Lewat tim suksesnya, Hasyim Muzadi mengklaim telah mendapat dukungan cukup besar dari seluruh cabang di tanah air. Antara lain, Riau 3 cabang, Jambi 5 cabang, Sumsel 9 cabang dan 1 wilayah, Bengkulu 4 cabang dan 1 wilayah, Lampung 11 cabang dan 1 wilayah, Jabar 15 cabang, DKI Jakarta 2 cabang, Jateng 20 cabang, Yogyakarta 2 cabang, Jatim 40 cabang, Kalsel 3 cabang, Kalbar 3 suara, Kalteng 3 cabang, Kaltim 5 cabang, Sulut 7 cabang, Sulteng 3 cabang, Sulsel 8 cabang, Sulra 2 suara, Bali 8 suara, NTB 7 suara, NTT 8 suara, Maluku 3 suara, dan Irian Jaya 4 suara.

Untuk melihat peta kekuatan pendukung Hasyim Muzadi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Peta Kekuatan Kans Hasyim Muzadi

No.	Daerah	Jumlah Kans Hasyim Muzadi		
		Wilayah	Cabang	Suara

1.	Riau		3	
2.	Jambi		5	
3.	Sumatera Selatan	1	9	
4.	Bengkulu	1	4	
5.	Lampung	1	11	
6.	Jawa Barat		15	
7.	DKI Jakarta		2	
8.	Jawa Tengah		20	
9.	Yogyakarta		2	
10.	Jawa Timur		40	
11.	Kalimantan Selatan		3	
12.	Kalimantan Barat			3
13.	Kalimantan Tengah		3	
14.	Kalimantan Timur		5	
15.	Sulawesi Utara		7	
16.	Sulawesi Tengah		3	
17.	Sulawesi Selatan		8	
18.	Sulawesi Tenggara			2
19.	Bali			8
20.	NTB			7
21.	NTT			8
22.	Maluku			3
23.	Irian Jaya			4
Jumlah Keseluruhan		3	140	35

Sumber: *Jawa Pos*, *Nakamura: Mukhtar Paling Kacau*, 23 Nopember 1999, hal. 3.

Dengan melihat tabel tersebut, dapat di ketahui bahwa jumlah keseluruhan pendukung Hasyim Muzadi terdiri dari 3 wilayah, 140 cabang, dan 35 suara.

Senada dengan kubu Hasyim Muzadi, kubu Said Aqiel Siradj pada 23 Nopember 1999 juga mengklaim telah mendapat dukungan yang cukup besar dan optimis bisa menang. Berbeda dengan kubu Hasyim Muzadi yang berani mengungkapkan jumlah pendukung secara transparan, kubu Said Aqiel Siradj hanya mengungkapkan kekuatan dukungan dengan cara menyebutkan persentase, dengan alasan penyebutan jumlah dinilai tidak etis.

Adapun persentase dukungan yang dikumpulkan Said Aqiel Siradj adalah Jatim 10 %, Jateng 40 %, Jabar 70 %, Lampung 50-60 %, Jambi mendekati 100 %, Sumsel 30 %, Bengkulu 90 %, Sumut 60 %, Sumbar 50 %, Riau 50 %, Kaltim 30 %, Kalteng 70 %, Kalbar 40 %, Kalsel 20 %, Sulteng hampir semua, Sulsel 60 %, Sulut 30 %, Maluku 30 %, Irian Jaya 20 %, NTB 40 %, dan NTT 40 %.

Untuk melihat peta kekuatan pendukung Said Aqiel Siradj, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Peta Kekuatan Kans Said Aqiel Siradj

No.	Daerah (n)	Jumlah Kans Said Aqiel Siradj
		Prosentase (%) (p)
1.	Jawa Timur	10
2.	Jawa Tengah	40
3.	Jawa Barat	70
4.	Lampung	60
5.	Jambi	100
6.	Sumatera Selatan	30
7.	Bengkulu	90
8.	Sumatera Utara	60
9.	Sumatera Barat	50
10.	Riau	50
11.	Kalimantan Timur	30
12.	Kalimantan Tengah	70
13.	Kalimantan Barat	40
14.	Kalimantan Selatan	20
15.	Sulawesi Tengah	100
16.	Sulawesi Selatan	60
17.	Sulawesi Utara	30
18.	Maluku	30
19.	Irian Jaya	20
20.	NTB	40
21.	NTT	40

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan = $\frac{p}{n}$	49,52
Jumlah sudah dibulatkan	50 %

Sumber: **Jawa Pos**, *Nakamura: Muktamar Paling Kacau*, 23 Nopember 1999, hal. 3.

Dengan melihat tabel tersebut, dapat di ketahui bahwa jumlah rata-rata keseluruhan pendukung Said Aqiel Siradj dari 21 daerah sebanyak 50 %.

Menurut penulis, adanya perbedaan pada Tabel 5.2 tentang peta kekuatan kans Hasyim Muzadi dan Tabel 5.3 tentang peta kekuatan kans Said Aqiel Siradj, karena beberapa alasan: *pertama*, penulis tidak merubah data yang sudah ada, hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian data dan keabsahan data. *Kedua*, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 tersebut menunjukkan strategi tim sukses Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj untuk memobilisasi kansnya dalam mensukseskan kandidatnya dalam merebut jabatan strategis di NU yakni Ketua Umum PBNU 1999-2004.

Untuk meyakinkan besarnya dukungan itu, tim sukses Said Aqiel Siradj juga mengatakan bahwa Kiai Idris Marzuki Pengasuh Ponpes Lirboyo-Kediri-Jatim telah mengumpulkan beberapa alumni Ponpes Lirboyo-Kediri-Jatim. Pada intinya, Kiai Idris Marzuki menyatakan bahwa alumni Lirboyo sudah saatnya memegang pucuk pimpinan di NU. Baik di posisi rais aam maupun di posisi ketua umum PBNU. (Jawa Pos, *Nakamura: Muktamar Paling Kacau*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

Bahkan, dua kandidat kuat ketua umum PBNU dalam Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo-Kediri-Jatim. Hasyim Muzadi dan

Said Aqiel Siradj, mengkalim sudah mendapatkan dukungan beberapa pengusaha untuk menjadi ketua umum PBNU 1999-2004.

Hasyim Muzadi mengaku sudah bertemu dengan beberapa pengusaha di Jakarta. Mereka siap bekerja sama dengan NU lewat investasi pengelolaan agroindustri guna menampung produk pertanian dihasilkan petani NU. Sehingga berapa pun hasil pertanian dan luas lahan yang ada, dia siap mengelola.

Pengakuan serupa juga dilontarkan Said Aqiel Siradj. Dia juga mengaku sudah mendapatkan dukungan beberapa pengusaha yang siap menyekolahkan tokoh-tokoh intelektual muda NU untuk melanjutkan sekolah sampai S3, baik di universitas dalam maupun luar negeri. Menurut Said, dalam lima tahun, kita memproyeksikan ada 1000 Doktor dari NU.

Selain dukungan di bidang pendidikan, Said Aqiel Siradj merencanakan akan mendirikan bank pertanian. Bank ini, rencananya, secara khusus akan membantu para petani NU di bidang permodalan. Sebab, selama ini petani NU kurang diperhatikan dan sulit mendapatkan kredit usaha. Dengan bank pertanian ini, kita berharap ekonomi petani NU akan meningkat.

Sementara itu, Gus Mus masih belum menegaskan kesediaannya menjadi calon Ketua Umum PBNU 1999-2004. Dia lebih banyak menunggu perkembangan di arena Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim dibandingkan mendengarkan suara-suara di luar muktamar. Meskipun demikian, ada tanda-tanda dia akan bersedia maju sebagai calon ketua umum PBNU bila dicalonkan secara resmi.

Pernyataan Gus Mus tersebut sekaligus membantah isu bahwa dirinya akan mundur dari pencalonan. Dia menganggap bahwa berita pengunduran dirinya yang tersebar di arena muktamar itu mengada-ada.

Gus Mus, demikian dia biasa dipanggil, memang tergolong calon yang tidak begitu ambisi untuk bersaing dengan kandidat yang lain. Bahkan sampai hari kedua muktamar tanggal 22 Nopember 1999, dia belum secara tegas menyatakan bersedia untuk memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia ini. (*Jawa Pos, Said Aqiel Siradj-Hasyim Muzadi Klaim Didukung Pengusaha, 22 Nopember 1999, hal.2*).

Memasuki hari kedua muktamar, dukungan terhadap duet Hasyim Muzadi-Sahal Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU dan Rois Aam Syuriah PBNU 1999-2004 semakin menguat. Tujuh PWNU telah menyampaikan dukungan terbuka.

Ketujuh wilayah itu masing-masing Jatim, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya. Khusus untuk Sahal Mahfudz ditambah DIY Yogyakarta.

Secara terbuka, saat mengakhiri tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban PBNU, PWNU Jatim, Bali dan NTB mendukung penuh tampilnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum untuk berdampingan dengan Sahal Mahfudz sebagai Rois Aam Syuriah. Sedangkan PWNU Kalteng mengajukan beberapa kriteria yang mengarah pada Hasyim.

Menurut Ketua PWNU Bali, Ahmad Jayadi, kami mendukung sepenuhnya Sahal Mahfudz sebagai Rois Aam Syuriah PBNU dan kami mendukung bapak Ahmad Hasyim Muzadi, saat mengakhiri pemandangan umumnya.

Sedangkan PWNU Jatim, melalui wakil ketuanya, Ali Maschan Moesa, mendukung duet tokoh asal Pati-Malang. Karena dianggap mampu melaksanakan ide-ide Gus Dur yang selama kepemimpinannya masih dalam tataran gagasan.

Ketua PWNU NTB, Hasan Usman dan Ketua PWNU Sulut, Parondo Rusli dalam pandangan umumnya mengatakan, kami mendukung sepenuhnya duet Sahal-Hasyim.

Ketua PWNU DI Yogyakarta, saat mengakhiri pandangan umumnya, hanya menyebut Sahal sebagai Rais Aam dan untuk jabatan ketua umum masih memikirkannya.

Sementara itu PWNU Kalteng dan Kalsel hanya menyebut kriteria ketua umum. Namun tetap mengarah pada Hasyim. Kriteria tersebut antara lain mengerti soal NU, bisa mengelola organisasi dengan baik, serta berpengalaman memimpin NU dari bawah.

Sebagaimana diketahui, dari tiga kandidat terkuat, hanya Hasyim Muzadi yang mempunyai pengalaman organisasi dari bawah, mulai dari Ketua PCNU Malang hingga PWNU Jatim. Sedangkan Said Aqiel begitu tiba dari Arab Saudi, langsung menduduki jabatan Katib Aam PBNU. Sedangkan Mustofa Bisri (Gus Mus) lebih banyak meluangkan waktunya di jajaran PBNU.

Sedangkan PWNU Irian Jaya, memberikan dukungan dengan cara tidak biasa di lakukan, yakni menyebut asal kiai sahal dan Hasyim. "Kami mendukung kiai yang dari Jateng untuk jabatan Rois Aam, dan kiai asal tuban sebagai ketua umum. (Surya, 7 *PWNU Kuatkan Hasyim-Sahal*, 23 Nopember 1999, hal. 16).

Di samping itu, ada beberapa cabang yang secara tegas mencalonkan Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Hasyim Muzadi Ketua PWNU Jatim, di dukung penuh oleh cabang-cabang di Jawa Timur, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Adik kandung Kiai Muchith Muzadi (Rais Syuriah PBNU) ini di kenal sebagai administrator dan berhasil memimpin NU Jatim selama dua periode. Ia juga di kenal dekat dengan Gus Dur.

Said Aqiel Siradj banyak di dukung kalangan muda dan intelektual NU. Doktor lulusan Ummul Qurro', Arab Saudi, ini dikenal berpikiran lateral dan cenderung liberal. Ia membuka komunikasi dengan siapa saja. Bahkan dia sering diundang berdiskusi umat Nasrani. Karena itu, Said yang juga dekat dengan Gus Dur ini tidak saja bergumul dengan komunitas NU, melainkan juga dengan umat-umat lain.

Mustofa Bisri (Gus Mus) rais Syuriah PBNU, adalah seorang kiai dan budayawan yang amat mumpuni. Pada tanggal 13 Nopember 1999 (sebelum mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim) dibuka, dia meluncurkan kaset kumpulan puisi-puisinya di Semarang. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Rembang, Jateng, ini juga seorang sufistik dan karismatik. Gus Mus adalah teman akrab Kiai Chamim Jazuli (Gus Mik), tokoh sentral seaman mantab. Ia akrab dan sangat di hormati Gus Dur.

Sedangkan Salahuddin Wahid (Ketua Umum Partai Kebangkitan Umat-PKU) adalah seorang kiai yang mempunyai kedekatan dengan birokrasi (semasa BJ. Habibie). Meskipun dia adik kandung Gus Dur, nama Salahuddin memang tidak

banyak di kenal di kalangan menengah dan bawah warga NU (*nahdliyyin*). Sebab, dia memang kurang tertarik dengan jabatan-jabatan struktural di NU.

Namun, melihat kemunculannya yang begitu cepat belakangan ini, bisa saja, dia akan menyalip tiga nama lainnya. Apalagi dia sudah mengantongi satu poin besar, yakni sama seperti kakaknya, cucu pendiri NU Al Maghfurillah Hadratusyekh Hasyim Asy'ari. Dia berhak meneruskan kepemimpinan Gus Dur.

Di atas kertas, nama Hasyim Muzadi (pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam-Malang-Jatim) memang sudah mengantongi suara cukup banyak. kedekatannya dengan Gus Dur juga menjadi poin menentukan. Apalagi, beberapa hari sebelum pelaksanaan muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, dia dipanggil Gus Dur ke Wisma Negara, Jakarta, hanya beberapa menit setelah dia menginjakkan kakinya di Bandara Juanda sepulang dari umrah.

Meski demikian, kans keempat kandidat tersebut tetap sama-sama besar. Hasyim Muzadi belum aman betul untuk lolos sebagai ketua umum. Bisa saja dia terganjal Said Aqiel Siradj, yang diidolakan kaum muda NU.

Utusan dari salah satu daerah di Jatim menyatakan, kalau Gus Mus secara tegas menyatakan bersedia, bisa saja dia akan didukung sebagian besar *muktamirin*. Akan tetapi, bisa saja Gus Salahuddin Wahid akan menjadi kuda hitam yang mengganjal ketiga calon tersebut.

Dukungan terhadap Said Aqiel Siradj secara tegas disampaikan tokoh spiritual NU, Kiai Muslim Imam Puro alias Mbah Lim. Pada tanggal 20 Nopember 1999 dia menemui Said Aqiel di kediaman Kiai Idris, pengasuh Pondok Lirboyo-Kediri-Jatim.

Disaksikan sejumlah kiai senior, Mbah Lim mendukung sepenuhnya Said Aqiel Siradj untuk menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode 1999-2004.

Restu Mbah Lim tersebut, tampaknya, memperkuat Said Aqiel Siradj untuk menjadi orang nomor satu di NU, setelah sejumlah daerah menyatakan dukungan, seperti Cabang Yogyakarta dan NTB.

Alasan Mbah Lim, ketua umum harus orang yang pandai dan memiliki tingkat keserjanaan minimal S-2. Dan, rumah Said Aqiel Siradj dekat dengan rumah Gus Dur. Sedangkan tentang Hasyim Muzadi, Mbah Lim mengatakan, bahwa ketua PWNU Jatim itu harus membantu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). (Jawa Pos, *Mbah Lim*, 21 Nopember 1999, hal. 3).

Sedangkan Yusuf Hasyim juga bermanuver dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu berusaha menggajal tampilnya Hasyim Muzadi sebagai calon kuat ketua umum PBNU.

Pak Ud, demikian ia biasa dipanggil, usai dialog interaktif dalam rangka peluncuran buku: "Yang Terhormat Guru Bangsa" pada tanggal 20 Nopember 1999 di Kediri, mempersoalkan pengalaman organisasi Hasyim Muzadi. Menurut dia, salah satu kriteria utama calon ketua umum PBNU ialah harus pernah menjadi pengurus harian PBNU. Kalau belum pernah menjadi pengurus, dia akan kesulitan mengurus PBNU.

Hasyim Muzadi memang salah satu kandidat terkuat dalam bursa calon ketua umum PBNU pada muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Konon ia sudah mendapatkan restu Gus Dur soal ini. Calon kuat lainnya adalah Said Aqiel Siradj, A.

Mustofa Bisri. Belakangan juga muncul adik kandung Gus Dur, yakni Salahuddin Wahid.

Manuver Pak Ud ini bisa jadi untuk memuluskan keponakannya, Salahuddin Wahid di PBNU. Akan tetapi, jika kriteria itu yang dijadikan alasan Pak Ud untuk menjegal Hasyim Muzadi, jelas itu juga berlaku untuk Salahuddin Wahid. Sebab, adik kandung Gus Dur ini juga belum pernah menjadi pengurus harian PBNU.

Menurut Pak Ud, syarat pernah menjadi pengurus harian PBNU untuk menjadi ketua umum ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung selama ini. Dan tradisi tersebut harus tetap dijaga. Sebab, pengalaman sebagai pengurus harian PBNU ini penting agar mereka mengetahui dalamnya PBNU.

Tokoh yang dulu selalu berseberangan dengan Gus Dur ini menolak jika pernyataannya ini dianggap sebagai upaya menjegal Hasyim Muzadi. Karena itu, dia tidak menyarankan Hasyim Muzadi mundur karena tidak memenuhi persyaratan ini. Sebab, tidak ada peraturan formal yang mengaturnya.

Pak Ud menjelaskan, tradisi tersebut untuk menjaga hierarki kepemimpinan di tubuh NU. Sebab, bagaimanapun, hierarki kepemimpinan dalam satu organisasi sangat penting untuk kaderisasi bertahap. (*Jawa Pos, Pak Ud Ganjal Hasyim Muzadi*, 21 Nopember 1999, hal. 1).

Menanggapi manuver Pak Ud ini, Hasyim Muzadi mengatakan, siapapun boleh berbicara apa saja dan berkomentar semuanya. Akan tetapi, dalam aturan yang ada, untuk menjadi ketua umum PBNU tidak ada persyaratan harus menjadi pengurus harian PBNU. (*Jawa Pos, Pemimpin NU Sebaiknya Dari Pesantren*, 21 Nopember 1999, hal. 3).

5.2. Gus Mus: Kandidat Alternatif Kiai Sepuh

Dua belas ulama yang mengikuti Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, pada 22 Nopember 1999 melakukan pertemuan tertutup di sebuah tempat rahasia. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas secara intensif manuver-manuver yang dilakukan para tim sukses Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj.

Menurut sumber yang dapat dipercaya, para kiai tersebut menilai, manuver yang dilakukan kedua kandidat tersebut sudah menjurus pada hal-hal yang kurang baik dan cenderung keluar dari tradisi NU. Apabila hal itu terus berlangsung, ada kemungkinan para kiai sepuh tersebut akan meminta kepada keduanya untuk menarik diri dari pencalonan.

Kemudian, para kiai itu memunculkan Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai calon ketua umum PBNU 1999-2004. menurut para ulama, Gus Mus dianggap sebagai sosok yang bersih dan masih berpegang pada tradisi NU. Meskipun disebut-sebut sebagai salah satu seorang calon, Gus Mus tidak melakukan manuver-manuver apa-apa. Bahkan, Gus Mus juga tidak memiliki tim sukses seperti Said Aqiel Siradj dan Hasyim Muzadi. Hal ini dibenarkan oleh Kiai Cholil Bisri dan Kiai Imron Hamzah yang mengikuti pertemuan tersebut. Menurut Kiai Cholil Bisri Dewan Syuro PKB yang mengikuti pertemuan tersebut, Said Aqiel Siradj dan Hasyim Muzadi masih diperbolehkan maju terus, sebab masalah pencalonan sepenuhnya hak *mukhtamirin* (peserta mukhtamar). Para ulama sepuh hanya akan mengingatkan para kandidat apabila melakukan kesalahan. (Jawa Pos, *Kia Sepuh Elus-Elus Gus Mus*, 23 Nopember 1999, hal. 1).

Sedangkan tentang Gus Mus yang dicalonkan kiai sepuh dalam pertemuan dua belas ulama tersebut, Kiai Cholil Bisri menjelaskan bahwa adik kandungnya itu termasuk orang *tawadhu*. Oleh karena itu, Gus Mus tidak pernah mencari sebuah jabatan (ketua umum PBNU). Tetapi, kalau amanat (baca: jabatan) itu ditimpahkan dipundaknya, tidak ada kata lain kecuali menerimanya. (Jawa Pos, *Nakamura: Muktamar Paling Kacau*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

Langkah kiai sepuh mempersiapkan Mustofa Bisri (Gus Mus) ternyata mendapat respons positif dari *muktamirin* (peserta muktamar). Beberapa *muktamirin* mengungkapkan, apabila Gus Mus maju, mereka akan memberikan dukungannya. Seperti halnya penilaian kiai sepuh, mereka juga menilai bahwa Gus Mus adalah sosok yang bersih dan tulus.

Sikap tersebut diungkapkan *muktamirin* dari Tangerang Lukman Hakim. Menurutnya, apabila Gus Mus bersedia maju, Tangerang akan memberikan dukungan. Sebab Tangerang memiliki pilihan. Akan tetapi, sifatnya belum final, karena itu, apabila Gus Mus maju, kami dari Tangerang siap memberikan dukungannya.

Dukungan semacam itu, menurut Lukman, tidak hanya berasal dari cabang Tangerang. Tetapi juga berdatangan dari daerah-daerah lain. Beberapa *muktamirin* setuju dengan Gus Mus. Tetapi karena Gus Mus belum mengungkapkan kesediaannya, maka dukungan itu belum diberikan dan *muktamirin* masih menunggu Gus Mus.

Pada 23 Nopember 1999 dua belas kiai sepuh (senior) telah mengadakan pertemuan tertutup. Dalam pertemuan itu, para ulama tersebut membahas soal

manuver-manuver yang dilakukan tim sukses Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj. Untuk sementara, mereka menilai manuver tim sukses itu sudah keluar dari tradisi NU.

Karena itu, para kiai sepuh tersebut bermaksud memberikan peringatan. Apabila tidak bisa diperingatkan, ada kemungkinan mereka akan minta kepada kedua kandidat tersebut untuk tidak meneruskan niat menjadi ketua umum PBNU. Selanjutnya, para kiai sepuh itu akan memaksa Gus Mus untuk bersedia dicalonkan. Pasalnya, apabila tidak dipaksa, Gus Mus dipastikan tidak akan bersedia.

Sementara itu, desakan kepada Gus Mus untuk maju dalam pencalonan Ketua Umum PBNU dari kiai sepuh semakin kuat. (*Jawa Pos, Gus Mus Akan Dipaksa Calonkan Diri*, 24 Nopember 1999, hal. 1).

Pada 23 Nopember 1999 sejumlah kiai asal Jatim mengirimkan surat khusus kepada kiai yang juga seniman asal Rembang, Jawa Tengah. Inti surat tersebut adalah meminta Gus Mus untuk menyelamatkan NU ke depan dengan memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia ini.

Sementara itu, pesan khusus agar Gus Mus bersedia menjadi Ketua Umum PBNU juga datang dari sejumlah kiai sepuh asal Jatim. Mereka antara lain, Mbah Kiai Sidik dan Mbah Kiai Chayyin (keduanya dari Banyuwangi), Kiai Abd. Ghofur Mustakim (Blitar), dan sejumlah ulama sepuh NU dari Tulungagung, Ponorogo, Tuban, Madura, dan Gresik.

Persoalannya, apakah tidak tabu menyanggulkan Gus Mus dengan Sahal Mahfudz yang sama-sama dari Jateng merupakan satu-satunya ganjalan. Hanya saja,

Muktamar Situbondo juga telah memilih rais aam berasal dari Jatim. Yakni Ahmad Siddiq (Jember) dan Abdurrahman Wahid (Jombang).

Sikap PWNU Jateng yang notabene daerah asal Gus Mus, ternyata juga sama. Wakil ketua PWNU Jateng Mohammad Adnan mengatakan, apabila Gus Mus bersedia maju untuk dicalonkan menjadi ketua umum PBNU, PWNU Jateng dan cabang-cabang di Jateng akan memberikan dukungan kepada Gus Mus.

Akan tetapi, karena Jateng sudah menjagokan Sahal Mahfudz sebagai rais aam, maka Jateng tidak akan mencalonkan. PWNU Jateng mengharapkan pencalonan Gus Mus diawali oleh daerah lain. Setelah itu, Jateng akan memberikan dukungan. Jadi, dalam hal ini, sikap kami pasif. Sama dengan sikap PKB ketika menghadapi pencalonan Gus Dur sebagai presiden, jelas Adnan. Menurut Adnan, pada hakikatnya, PWNU Jateng merasa bangga dan senang apabila Gus Mus jadi Ketua Umum PBNU 1999-2004. Tetapi, karena pertimbangan etika, Jateng bertekad tidak akan mengawali pencalonan terlebih dulu. "Terus terang saja, yang ada dalam benak kami hanya demi kebaikan NU. Sama sekali tidak ada pikiran lain.

Menurut Adnan, pencalonan Kiai Sahal Mahfudz sebagai Rais Aam adalah keputusan final bagi Jateng. Karena itu, NU Jateng tidak ingin ulama karismatik ini didampingi oleh Ketua Umum PBNU yang kurang baik. Kiai Sahal adalah ulama yang baik. Karena itu, kami tidak rela apabila beliau diberi anak macan. (Jawa Pos, *Gus Mus Mirip Gus Dur Di SU MPR*, 24 Nopember 1999, hal. 7).

5.3. Mukhtar Lirboyo: Antara Demokratisasi dan Restu Kiai Sepuh

Restu kiai sepuh kepada para kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, tanggal 21-26 Nopember 1999, adalah satu hal yang menonjol dan termasuk tema yang penting sehingga banyak orang dan media massa banyak yang membicarakan. Seperti halnya di Mukhtar dan hajatan lain NU sebelumnya, termasuk pencalonan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI ke-4, restu kiai sepuh selalu lebih penting dan utama dibanding dukungan dari 'pemilik' suara dalam suatu pemilihan ataupun voting. Artinya, pemilik atau pemilik suara, yakni cabang dan wilayah di mukhtar menggunakan restu para kiai sebagai acuan memilih Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004.

Mereka tidak akan memilih kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 di luar yang mendapat restu kiai. Yang menarik, dalam Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, restu para kiai sepuh NU yang jumlahnya puluhan itu tidak diberikan pada satu kandidat saja. Sebagai contoh, Kiai Ma'sum Jauhari pembina Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri-Jatim dengan terus terang mendukung Hasyim Muzadi. Kiai Ma'sum Jauhari yang juga Ketua Umum sekaligus Mahaguru Pencak Silat Pagar Nusa, bahkan aktif berkampanye dengan menandatangani selebaran yang *provokatif* agar tidak mendukung Said Aqiel Siradj.

Sebaliknya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila, Klaten, Jateng, Kiai Muslim Rifai Imampuro, yang biasa dipanggil Mbah Lim, dengan lugas mendukung Said Aqiel Siradj. Alasannya karena salah satu program Said Aqiel Siradj adalah mencetak 1.000 doktor dalam lima tahun dan itu menarik bagi Mbah Lim, yang jika berbicara harus diterjemahkan oleh orang kepercayaannya.

Konsekuensi dari tidak satunya restu para kiai sepuh tersebut tentu saja membuat para pemilih harus berpikir ulang, kandidat mana yang sebenarnya memperoleh restu dari kiai-kiai sepuh. Dari sisi para kiai, meskipun sempat mengeluarkan pernyataan keprihatinan, karena sengitnya persaingan antar kandidat hal ini harus dilihat bahwa para kiai sepuh ingin menyerahkan sepenuhnya pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 kepada *floor*. Tampaknya para kiai sepuh terinspirasi pada semangat demokrasi yang terus berkembang sejak reformasi dikumandangkan. Hal ini tampaknya juga ditangkap *floor* dengan baik dalam Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, dan harus diakui, restu para kiai sepuh tetap menjadi acuan utama bukan sekedar persaingan dukungan semata. (elKapim, 2000:53-54).

Sementara itu, bersamaan dengan mengkrystalnya nama Kiai Sahal Mahfudz sebagai calon kuat rais aam syuriah PBNU, para Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 mulai sibuk melakukan “konsolidasi” dengan kiai yang juga paman presiden Gus Dur ini. Hal ini tidak lain disebabkan dalam tata tertib (tatib) pasal 28, para kandidat harus mendapat persetujuan dari rais aam dan wakil rais aam.

Banyak kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang memburu Kiai asal pati itu. Tentu saja motifnya adalah melakukan *bargaining*. Bahkan, kata sumber *Jawa Pos*, ada yang sudah sampai melakukan *power sharing* untuk kepemimpinan PBNU 1999-2004.

Menurut sumber yang menolak disebut jatidirinya itu, sebagian besar kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 sudah bertemu dengan Kiai Sahal Mahfudz. Mereka antara lain, Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siradj, Salahuddin Wahid, Mustofa Bisri, dan Achmad Bagja. Selain itu, para kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 itu juga

sovan ke beberapa kiai sepuh lain. Antara lain, ada yang menemui Rais Aam Kiai Ilyas Ruchiyat dan shahibul bait (tuan rumah) Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim Kiai Idris Marzuki.

Tentu saja, maksud menemui para kiai sepuh itu agar memperoleh restu dan melancarkan pencalonannya menuju kursi Ketua Umum PBNU 1999-2004. Kiai Idris Marzuki sendiri mengakui tidak keberatan terhadap Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang minta restu kepadanya. Sebagai tuan rumah, kami tetap harus netral karena tugas kami adalah melayani seluruh tamu.

Meskipun mengaku netral, Kiai Idris Marzuki memberikan catatan kecil. Secara halus, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo itu menyarankan kepada kepada *muktamirin* (peserta muktamar) agar menjatuhkan pilihannya kepada calon yang benar-benar berasal dari kader NU. Mengenai siapa orangnya, terserah *muktamirin* (peserta muktamar). Saya hanya mengingatkan agar persaingan Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 tidak mempertentangkan antara satu pondok dengan pondok yang lain.

Hal itu ditegaskan Kiai Idris Marzuki karena ada selebaran yang berisi dukungan terhadap salah satu kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dengan menonjolkan asal pondoknya. Untuk menjaga netralitas pondok, sampai-sampai Gus Maksum, salah seorang pengasuh Pondok Lirboyo, juga melakukan *counter* balik terhadap selebaran serupa yang isinya minta agar *muktamirin* (peserta muktamar) tidak memilih calon yang suka datang ke gereja. Selebaran ini ditempel di berbagai sudut arena Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Sementara itu, pada hari Selasa 23 Nopember 1999, Kiai Idris Marzuki memanggil Hasyim Muzadi agar menemui dirinya. Saat dikonfirmasi, Hasyim Muzadi pun mengakui. “Saya memang *ditimbali* (dipanggil) Kiai Idris Marzuki. Tetapi, ini jangan dipolitisasi bahwa saya minta restu kiai. Kalau soal restu kiai, jangan tanya saya. Sebagai santri, saya harus tetap patuh apa kata para kiai. Sebab, beliau-beliau itu adalah orang tua kami sendiri yang wajib dihormati dan ditaati.

Selang beberapa saat, tampak Salahuddin Wahid yang akrab di panggil Gus Sholah juga datang di kediaman Kiai Idris Marzuki. Selain bertemu Kiai Idris Marzuki, Gus Sholah mengaku sempat berbicara beberapa hal dengan Hasyim Muzadi di rumah Kiai Idris Marzuki. Termasuk juga menyampaikan pesan Gus Dur. Kalau nantinya Hasyim Muzadi menjadi Ketua Umum PBNU 1999-2004, ia diminta bisa ikut membantu dengan menyertakan dirinya dalam struktur PBNU 1999-2004.

Gus Sholah tidak membantah ketika ditanya sudah ada pembicaraan awal mengenai deal-deal politik dengan Hasyim Muzadi. Adik kandung Gus Dur itu mengaku tidak ingin keterlibatannya dalam NU nanti semata-mata pemberian. “Saya ingin masuk melalui perjuangan. Dan, apa yang saya lakukan ini merupakan bagian dari perjuangan. Pak Hasyim Muzadi juga bercerita serupa seperti yang pernah disampaikan Gus Dur kepada saya. Yaitu soal usul agar saya ikut membantu NU. (Jawa Pos, *Gus Mus Mirip Gus Dur Di SU MPR*, 24 Nopember 1999, hal. 7).

Beberapa jam sebelum berlangsungnya pemilihan ketua umum PBNU suasana kian memanas. Hal ini membuat para kiai sepuh prihatin. Karena itu hari Kamis pada 25 Nopember 1999, 14 kiai sepuh mengadakan pertemuan, menyusul keprihatinan

mereka terhadap selebaran dan isu *money politics* dalam arena Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim yang semakin semarak.

Pertemuan yang diprakarsai Kiai Idris Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri-Jatim itu melahirkan pernyataan yang ditanda tangani para kiai sepuh. Isinya, mereka menyesalkan semakin maraknya isu *money politics*. *Tanbih* (peringatan) tersebut menegaskan, cara-cara yang dilakukan itu sangat bertentangan dengan etika dan budaya NU.

Adapun 14 kiai sepuh yang mengadakan pertemuan, menyusul keprihatinan terhadap selebaran dan isu politik uang (*money politics*) dalam arena Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4

Empat Belas Kiai Sepuh Yang Mengadakan Pertemuan Terhadap Dugaan Politik Uang (*Money Politics*) Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

No.	Nama	Jabatan
1.	KH. M. Ilyas Ruchiyat	Rais Aam Syuriah PBNU.
2.	KH. Abdullah Faqih	Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban Jatim.
3.	KH. Sahal Mahfudz	Pengasuh Pondok Pesantren Kajen Pati Jateng.
4.	KH. Abdullah Abbas	Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
5.	KH. Idris Marzuki	Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jatim.
6.	KH. M. Subadar	Pengasuh Pondok Pesantren Pasuruan Jatim.
7.	KH. Imron Hamzah	Rais Syuriah PWNU Jatim.
8.	KH. Nurul Huda Jazuli	Pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri Jatim.
9.	KH. Ma'ruf Amin	Katib Syuriah PBNU.
10.	KH. Fuad Hasyim	Pengasuh Pondok Pesantren Cirebon.
11.	KH. Imam Yahya Machrus	Pengasuh Pondok Pesantren Kediri Jatim.
12.	KH. Zainuddin Jazuli	Pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri Jatim.
13.	KH. Fakhruddin Masturo	Pengasuh Pondok Pesantren Sukabumi.
14.	KH. Turmudzi Badruddin	Rais Syuriah PWNU NTB.

Sumber: Surya, *Duet Sahal Mahfudz-Sakhruddin Terkuat*, 26 Nopember 1999, hal.1.

Dalam pertemuan tersebut, kiai-kiai sepuh juga membahas isu tentang adanya restu dari kiai sepuh kepada salah satu calon. Para kiai sepuh menyatakan kecewa dengan berbagai selebaran yang saling menjatuhkan antar kandidat selama Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Untuk menjaga kemurnian Mukhtamar NU ke-30, para kiai sepuh menyerukan kepada semua pihak, baik kandidat maupun *muktamirin* (peserta mukhtamar) untuk kembali kepada *arruju' ila alhaq* (kebenaran), dan bertindak sesuai *al akhlaq ul karimah* (sikap mulia) secara ikhlas.

Mengenai restu, para kiai sepuh menyatakan tidak hanya merestui salah satu kandidat ketua umum PBNU, tetapi merestui semua kandidat. Asalkan kandidat itu memenuhi syarat sesuai dengan tata tertib mukhtamar yang telah diputuskan.

Lewat pernyataan itu, para kiai sepuh tersebut mengajak warga NU (*nahdliyyin*) untuk memanjatkan do'a kepada Allah SWT agar mukhtamar berlangsung *husnul khitam* (sukses). Pernyataan itu ditanda tangani oleh 14 kiai sepuh. (Surya, *Duet Sahal Mahfudz-Sakhruddin Terkuat*, 26 Nopember 1999, hal.1).

Sementara itu, di arena Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, ketegangan sempat mewarnai para kandidat. Ketegangan itu baru mencair setelah para kandidat, Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siradj, Mustofa Bisri, dan Salahuddin Wahid mengadakan pertemuan tertutup di sebuah kamar di kediaman Kiai Idris Marzuki pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jatim.

Hadir dalam pertemuan rahasia itu, tuan rumah **Kiai Idris Marzuki** (pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jatim), **Kiai Yusuf Muhammad** (Jember-Jatim), **Kiai Fuad Hayim** (Cirebon), **Kiai Cholil Bisri** (Rembang Jateng),

Rozi Munir (panitia pusat) dan beberapa ulama lain yang selama ini mengikuti perkembangan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Said Aqiel Siradj memasuki ruang pertemuan saat tiga kandidat lainnya sedang makan siang. Beberapa saat kemudian disusul Mustofa Bisri, Sementara Hasyim Muzadi terlibat pembicaraan cukup serius dengan Slamet Effendi Yusuf (Mantan ketua PP GP Ansor) yang sekarang menjadi salah satu ketua DPP Partai Golkar.

Sedang Salahuddin Wahid duduk sendirian sambil menikmati makanan. Kedua kandidat ini terburu-buru masuk setelah Gus Yus, panggilan akrab Kiai Yusuf Muhammad, memintanya masuk. Para kandidat dan kiai sepuh itu terlihat dalam pembicaraan yang cukup serius.

Kiai Fuad Hasyim (Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon) mengatakan, saya minta semuanya ikut menciptakan suasana yang sejuk, tidak memanas-manasi situasi dengan berbagai manuver yang tidak sesuai dengan etika dan budaya NU.

Menurut Kiai Fuad, NU saat ini menghadapi tantangan cukup berat dan memerlukan pemimpin yang penuh keikhlasan. Said Aqiel Siradj, Hasyim Muzadi, Mustofa Bisri, Salahuddin Wahid adalah aset NU yang diharapkan dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi NU.

Sangat disayangkan, lanjut Kiai Fuad, kalau hanya karena ingin menjadi ketua Tanfidziyah, tiba-tiba muncul isu yang sebenarnya tidak perlu ada.

Sementara Gus Yus, Kiai Cholil Bisri, dan kiai yang lain berharap semua potensi NU ini tetap diakomodir PBNU, mengingat masing-masing mempunyai

kekurangan dan kelebihan, sehingga dapat saling menutupi. NU memang membutuhkan orang seperti Pak Said, Cak Hasyim, Gus Mus, dan Gus Solah.

Mendengar arahan singkat itu, keempat kandidat saling berpandangan, dan bersepakat akan mendukung siapapun yang menang dalam pemilihan. Upaya lain para kandidat akan mengingatkan para pendukungnya agar tidak mengumbar emosi dan tetap menjaga kebutuhan dalam tubuh NU. (Surya, *Temu Kandidat*, 26 Nopember 1999, hal. 15).

Dengan demikian, tidak dipungkiri bahwa Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim tidak hanya mengedepankan restu kiai sepuh dalam rekrutmen kepemimpinan Ketua Umum PBNU 1999-2004, karena tidak satunya yang memperoleh restu kiai sepuh. Akan tetapi juga melalui proses demokratisasi, karena para kiai sepuh ingin menyerahkan sepenuhnya pemilihan Ketua Umum PBNU kepada *floor*. Tampaknya para kiai sepuh terinspirasi pada semangat demokrasi yang terus berkembang sejak reformasi dikumandangkan. Hal ini tampaknya juga ditangkap *floor* dengan baik dalam Muktamar NU Lirboyo, dan harus diakui, restu para kiai sepuh tetap menjadi acuan utama bukan sekedar persaingan dukungan semata.

Sebagaimana yang dikatakan Hasyim Muzadi dalam wawancara dengan penulis di Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, pada Selasa, 26 Nopember 2002, Pukul 21.00-22.00 WIB menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim sudah melalui proses demokratisasi.

Sedangkan dalam wawancara penulis dengan Said Aqiel Siradj setelah acara Tabligh Akbar, Festival Shalawat Burdah, dan Khitanan Massal dalam Rangka Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW., di Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya pada Senin, 30 Juni 2003, Pukul: 23.30-24.00 WIB menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim masih dalam proses setengah demokrasi.

5.4. Proses Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004

5.4.1. Gus Mus Mengundurkan Diri

Sehari menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004, bursa kandidat semakin transparan. Pada hari Rabu, 24 Nopember 1999 Mustofa Bisri menegaskan penolakannya untuk memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Dia menyarankan *muktamirin* (peserta muktamar) untuk memilih calon lain yang telah bersedia memimpin NU.

Penolakan Gus Mus, panggilan akrab kiai yang seniman ini, jelas kembali memperlempang Hasyim Muzadi dari Jawa Timur untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Apalagi, sejumlah tokoh NU yang sebelumnya melirik Gus Mus untuk tampil sudah mulai menggandeng Hasyim Muzadi.

Kiai Yusuf Muhammad, salah satu elemen dari forum Langitan yang semula condong ke Gus Mus, tampak bersama-sama dengan Hasyim Muzadi. Ini terjadi setelah kedua tokoh NU dari Jatim ini berkunjung ke rumah Kiai Idris, tuan rumah Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Dua orang ini bersama-sama satu



mobil menuju Hotel Safari Kediri, tempat Hasyim Muzadi mengadakan konferensi pers.

Pernyataan Gus Mus yang tidak ingin dipaksa-paksa menjadi Ketua Umum PBNU itu langsung disambut lega oleh para pendukung Hasyim Muzadi. Seperti yang diakui Ketua kontingen Jatim Ali Maschan Moesa, jika Gus Mus tidak maju, peluang calon dari Jatim ini semakin lempang. Paling tidak, cabang dan wilayah yang sudah menyatakan dukungannya tidak lagi terpecah.

Beberapa wilayah dan cabang juga semakin banyak yang mendekati ke kubu Hasyim Muzadi. Bahkan, mereka juga menyatakan dukungannya kepada Hasyim Muzadi untuk menjadi ketua umum PBNU 1999-2004. di antara yang menegaskan dukungannya adalah cabang-cabang di wilayah Jawa Barat yang semula disebut-sebut menjadi pendukung Said Aqiel Siradj. Demikian juga beberapa cabang di Jawa Tengah.

Menurut utusan dari Jawa Barat Man Muhammad Iskandar yang juga Ketua LP Ma'arif Jabar, semula banyak cabang di Jabar yang memberikan dukungan ke Pak Said Aqiel Siradj dan Pak Ahmad Bagdja. Tetapi, setelah ada beberapa kompromi dengan memberikan wakil rais aam ke Jabar, akhirnya banyak cabang yang berbalik mendukung Pak Hasyim Muzadi. (*Jawa Pos, Gus Mus Menolak, Hasyim Menguat Lagi*, 25 Nopember 1999, hal. 1).

Menurut perhitungan Iskandar, jumlah cabang di Jabar yang diperkirakan mendukung Pak Hasyim Muzadi sedikitnya sudah mencapai 50 persen dari 31 cabang NU di Jabar. Dukungan cabang sisanya akan diberikan ke Said Aqiel Siradj dan Ahmad Bagdja.

Masih menurutnya, dukungan dari Jabar dan Jatim kepada Pak Hasyim Muzadi akan lebih besar jika pencalonan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Rais Aam. PWNU Bengkulu juga melihat posisi Hasyim Muzadi semakin kuat. Terutama setelah Gus Mus memberikan sinyal tidak akan mencalonkan diri.

Ketua PWNU Bengkulu Isa Ansori Ishak mengakui telah bertemu dengan beberapa kandidat, termasuk Hasyim Muzadi yang dinilai memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman organisasi yang tinggi.

Meskipun tidak mengakui terus terang menyebut nama kandidat yang didukung, secara implisit dia memberikan dukungan ke Hasyim Muzadi. Pasalnya, dia mengajukan kriteria kandidat yang akan didukungnya. Kami hanya memilih kandidat ketua umum PBNU yang memiliki kemampuan memimpin organisasi dengan teruji dan memiliki keikhlasan untuk membangun organisasi ini.

Sedangkan Said Aqiel Siradj, sejak hari pertama Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, dukungan terhadap kandidat lulusan Universitas Ummul Qurro', Makkah, ini mulai berkurang. Apalagi, dalam sambutannya, Presiden Gus Dur melontarkan kritik terhadap Said Aqiel Siradj. Kritik tersebut oleh para *muktamirin* (peserta muktamar) dianggap sebagai sinyal bahwa Gus Dur tidak setuju terhadap tampilnya anggota Komnas HAM yang sebelum ini menjadi Katib Aam PBNU ini. Apalagi, langkah tim suksesnya yang mengklaim dukungan Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri-Jatim dinetralisir oleh para kiai yang menjadi tuan rumah muktamar.

Pernyataan Gus Mus dalam konferensi pers di Hotel Merdeka pada hari Rabu, 24 Nopember 1999, memang ditunggu-tunggu para wartawan dan *muktamirin*

(peserta muktamar). Pasalnya, Gus Mus yang namanya menggelinding mulai hari kedua muktamar tampak selalu menghindari kejaran wartawan. Akibatnya, meskipun dukungan mulai menguat, sikap dia terhadap pencalonan itu sendiri masih tidak jelas.

Seperti diketahui, nama Gus Mus mulai menggelinding setelah para kiai sepuh prihatin terhadap menajamnya pertarungan antara dua kandidat, yakni Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj. Tajamnya pertarungan itu lebih disebabkan oleh manuver para tim sukses masing-masing kandidat yang oleh para kiai sepuh dinilai telah melanggar etika dan norma-norma di NU. Para kiai sepuh itu pun mengancam, kalau manuver para tim sukses tidak dihentikan, para kiai sepuh mengancam akan memaksa Gus Mus tampil.

Gus Mus dalam konferensi pers pada 24 Nopember 1999 meminta agar masalah pencalonan Ketua Tanfidziyah PBNU tidak dibesar-besarkan. Hal itu dimaksudkan agar peserta muktamar bisa belajar dari kesalahan masa lalu, yang terlalu menganggap sangat penting jabatan Ketua Tanfidziyah daripada Rais Aam.

“Sejak saya ikut menyusun konsep khittah di Situbondo dulu, yang sebenarnya akan diperjuangkan adalah posisi rais aam karena sangat strategis. Karena kesalahan yang telah dibuat Pak Idham (Kiai Idham Khalid) ketika itu. Tapi, kesalahan itu dibuat lagi Gus Dur. Kali ini jangan diulang lagi”, kata Gus Mus dengan nada penuh permintaan.

Dia mengibaratkan NU sebagai pondok pesantren besar. Di sini rais aam bertindak sebagai kiai, sedangkan ketua tanfidziah sebagai lurah pondok. Karena itu, ia minta munculnya kandidat yang sudah ada, seperti Hasyim Muzadi, Said Aqiel

Siradj, dan Ahmad Bagdja, tidak dipersoalkan. Sebab, nanti akan ada Syuriah yang harus diberi posisi yang kuat, AD/ART, dan Qonun Asasi NU yang harus ditaati.

Soal indikasi kuat tentang banyaknya kandidat yang melakukan intrik negatif, seperti *Money Politics*? "Gendeng, apa. *Penggawaen* (pekerjaan) kok harus membayar, hentikan itu, tegas Gus Mus.

Ketika dipaksa wartawan untuk menegaskan bersedia atau tidak dicalonkan, Gus Mus hanya berujar bahwa dalam masalah ini dia tidak berani memberikan ketegasan. "saya sangat senang sudah ada yang bersedia. Alasan saya, *pertama*, karena alasan NU. *Kedua*, karena alasan pribadi. Di mana yang tahu kemampuan saya hanya diri sendiri".

Gus Mus mengaku selama ini dia merasa susah mengatur dirinya, apalagi kalau harus diberi beban mengurus organisasi sebesar NU. "Makanya, tolong saya jangan didesak atau dipaksa-paksa. Kalau hanya bertanggung jawab terhadap umat, saya siap. Tapi kalau tanggung jawab kepada Allah, itu yang saya tidak sanggup," lanjut Gus Mus dengan nada datar, tapi sangat mengena.

Menurut Gus Mus, bangunan wacana NU ke depan yang sudah di bangun Gus Dur harus bisa dilanjutkan oleh orang yang benar-benar mengetahui organisasi. Dengan begitu, khidmat NU kepada umat akan lebih optimal. Sekaligus, agar NU bisa membantu kerja Gus Dur, baik dengan karya nyata maupun kritik yang membangun.

Karena itu, ulang Gus Mus, NU di masa yang akan datang sangat membutuhkan organisator andal. Gus Mus sendiri mengaku tidak berkemampuan membidangi masalah organisasi NU yang sangat besar itu.

Kemudian, Gus Mus menyitir kaidah *ushul fiqh: tausid alamri ila ahlihi* (serahkan urusan bidang pada ahlinya). Mengingat kondisi NU saat ini, maka sangat dibutuhkan orang-orang yang benar-benar paham dan menguasai masalah organisasi.

Meski sudah menolak menjadi ketua umum PBNU, ternyata masih ada yang ragu apakah pernyataan itu benar-benar penolakan atau bukan. Menurut salah seorang A'wan Syuriah PBNU Noer Iskandar Al Barsany setelah jumpa pers Gus Mus mengatakan bahwa ada indikasi Gus Mus masih bersedia. Sebab, kalau menolak, beliau akan terus terang. Tapi kalau masih semacam itu, saya masih yakin Gus Mus bersedia.

Ketua PWNU DKI Jakarta Abdul Wahid Azis berpendapat senada. “siapa pun, yang paling cocok memimpin NU ke depan ya Kiai Mustofa Bisri. Beliau itu bersih dari kontaminasi apa pun. Beliau juga mampu mengakses dalam dan luar negeri. Apalagi sangat teguh dalam tradisi NU. Jadi, Gus Mus itu yang cocok menurut Jakarta.

Bahkan sekretaris PWNU DI Yogyakarta Nuruddin Amin meminta agar faktor kedaerahan jangan sampai ditonjolkan. Sehingga apabila nanti terjadi duet Kiai Sahal Mahfudz dan Gus Mus yang keduanya berasal Jateng, hal itu tidak tabu.

Menurut Nuruddin, banyak pihak mendukung pencalonan Gus Mus sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004, dengan pertimbangan masa depan dan kemandirian NU. Di tangan Gus Mus, NU akan lebih independen, khususnya terhadap Gus Dur yang menjadi Presiden pada saat Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Kalau Pak Hasyim Muzadi masih *nunut urip* pada Gus Dur. Sedangkan Pak Said Aqiel Siradj, masih sangat goyah.

Alasan lain memunculkan Gus Mus adalah menjembatani sekaligus regenerasi di tubuh NU. Baik Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj belum begitu paham bahasa prokem di NU. Ini sangat berbeda dengan posisi Gus Mus yang baik di mana-mana.

Secara tegas, Gus Nung menghendaki, NU jangan sampai dipimpin seorang manajer, tapi harus tetap dipimpin seorang ulama. “Sekali lagi, keulamaan Gus Mus tidak diragukan ketimbang yang lain”.

Tanggapan senada disampaikan oleh beberapa pengamat politik yang hadir di arena Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Pengamat politik Fachry Ali dengan tegas mengatakan bahwa pernyataan Gus Mus itu masih berbau bersedia. Di NU tradisinya memang begitu. Selalu merendah. Dan biasanya, orang yang seperti itulah yang pada akhirnya mendapat dukungan yang luas.

Dalam masalah Gus Mus ini, Fachry menilai bakal ada persoalan yang cukup rumit. Sebab, Gus Mus kebetulan berasal dari Jateng yang nota bene telah memiliki Kiai Sahal Mahfudz yang berpeluang besar menjadi rais aam. Memang hal itu, tidak ada aturannya. Tetapi, bagaimanapun, itu akan menjadi persoalan cukup pelik.

Dalam hal ini, Fachry mengambil contoh sikap beberapa kader muda NU yang ditemuinya. Rata-rata, mereka mempersoalkan konsentrasi kekuasaan di Jawa. Sebab, bagaimanapun, realitas semacam ini tidak akan menguntungkan bagi perkembangan NU.

Meskipun begitu, pengamat kelahiran Aceh ini tetap memandang bahwa Gus Mus tidak terhalang sepenuhnya oleh realitas tersebut. Ulama asal Rembang Jateng ini tetap dinilai mempunyai peluang untuk dipilih. Yang terpenting, pemilihan itu berlangsung secara demokratis dan terbuka.

Sedangkan pengamat NU dari Perancis Andree Faellard menilai langkah Gus Mus itu merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, Gus Mus adalah seorang ulama yang memiliki kelebihan yang cukup menonjol. Sehingga, sangat wajar apabila Gus Mus tidak menampakkan ambisi untuk merebut sebuah jabatan.

Sosok Gus Mus, lanjut Andree Faellard, sangat pas diterapkan di mana saja. Di posisikan di jajaran tanfidziyah pantas, di jajaran syuriah juga pantas. Yang terpenting adalah kesediaan Gus Mus.

Sementara itu, kandidat kuat Hasyim Muzadi, pada 24 Nopember 1999 malam melakukan pertemuan intensif dengan wakil dari 120 cabang di Aula Hotel Safari, Kediri-Jatim. Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumut, dan Bali.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persoalan yang berhubungan dengan NU. Selain itu, soal power sharing juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurut sebuah sumber, Hasyim Muzadi menawari Jabar untuk posisi wakil Rais Syuriah PBNU. Salah satu nama yang disebut adalah Kiai Makruf Amin.

Pada kesempatan berbeda, Said Aqiel Siradj pada 24 Nopember 1999 menemui *shahib al bait* Kiai Idris Marzuki. Dalam kesempatan itu Said Aqiel Siradj memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya yang dinilai banyak kalangan “menjual” Lirboyo-Kediri-Jatim. Selain itu, Said Aqiel Siradj juga menjelaskan isi selebaran Gus Maksum yang menuduhnya sering masuk Gereja. (Jawa Pos, *Pendukung Said Aqiel Mrotoli*, 25 Nopember 1999, hal. 7).

5.4.2. Misi Dan Visi Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

Menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004, sejumlah kandidat telah berkampanye dan menyampaikan sejumlah program kalau memegang jabatan tersebut selama lima tahun ke depan. Tiga kandidat yang memaparkan berbagai rencana kerjanya sebagai berikut:

1. Said Aqiel Siradj (Katib Aam Syuriah PBNU)

- a. Akan mencetak 1.000 doktor dari berbagai disiplin ilmu dari dalam dan luar negeri selama lima tahun mendatang jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Hal itu berkaitan dengan pemberdayaan dan pembenahan sumber daya manusia (SDM) yang perlu dioptimalkan. Yakni mulai dari *tarbiyah* (pesantren/pendidikan) diangkat sebagai *takofah* (pola pikir) bangsa sehingga menjadi *hadorah* (budaya) dan akhirnya mewujudkan *maduniyah* (peradaban) kehidupan bangsa. Dengan demikian masyarakat Indonesia sudah Islam, meskipun tidak menunjukkan label-label Islam, asas Islam, simbol Ka'bah sudah Islam sendiri. Sebagaimana telah dilaksanakan oleh para Wali Songo yang telah mampu mendakwahkan Islam di Jawa dengan pendekatan transformasi budaya dan *akhlakul karimah*, itu yang penting karena merupakan khittah NU yang harus dilestarikan.
- b. Akan merubah AD/ART, termasuk dihapusnya struktur *Mustasyar* (Dewan Penasehat, adanya cabang istimewa yakni di Kuala Lumpur (Malaysia), Jeddah (Saudi Arabia), Kairo (Mesir), dan Australia.

- c. Soal ekonomi kerakyatan, dirinya telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa pihak, seperti IPB untuk mendirikan Bank Petani dan Sentral Data Pertanian.
- d. Soal orang daerah yang harus bekerja di Jakarta dan meninggalkan keluarganya untuk waktu cukup lama. Terkait dengan kebutuhan batin suami dan istri yang berpisah cukup lama, menjadi tantangan ormas Islam untuk dicarikan solusinya.
- e. Masalah lokalisasi, kita tidak bisa langsung mengatakan haram kemudian lokalisasi tersebut dibakar, tetapi tidak bisa juga melegitimasi, itu harus dicarikan solusinya yang bisa diterima semua pihak.
- f. Soal kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian kita semua, karena dalam Al-Qur'an merusak lingkungan berarti berbuat *ijram* atau kriminal.
- g. Mendukung penuh rencana pemerintahan Gus Dur dalam membangun hubungan dagang dengan Israel, karena dalam Al-Qur'an Allah SWT, tidak pernah melarang umatnya berhubungan dengan non muslim, sebatas saling menghormati dan tidak dalam keadaan dikuasai atau menganggap mereka sebagai wali atau pemimpin. Sebab menciptakan permusuhan memang gampang tetapi menciptakan kedamaian itu yang sulit.

2. Hasyim Muzadi (Ketua PWNU Jatim)

Menurut Hasyim Muzadi, sejak awal NU didirikan bukan untuk NU, tetapi berjuang untuk agama dan negara. Hasyim Muzadi menyatakan, bahwa dia memiliki enam misi dan visi dalam membangun NU lima tahun ke depan, yakni:

- a. Sisi keagamaan karena selama ini ulama-ulama NU melakukan justifikasi masalah perkembangan hukum di tengah masyarakat.
- b. Tentang hubungan agama dan negara, yakni agar agama menjadi motivasi perkembangan negara dan negara menjadi protektor terhadap perkembangan agama. Tidak perlu terjadi lagi kontradiksi, di mana agama dipakai menggoyang negara atau negara dimanfaatkan untuk melemahkan agama.
- c. Ekonomi keumatan, di mana umat NU di level *grass root* sangat mendambakan pengembangan ekonomi keumatan dan kerakyatan. Dalam hal ini kita harus melihat perlunya proteksi dari pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut.
- d. Sikap NU di tengah multi sistem multi partai, diperlukan perumusan yang jelas sehingga tata hubungan antara NU yang berkhittah dan NU yang merupakan ormas tetap independen keberadaannya di tengah multi partai yang dipastikan selalu terjadi menarik kepentingan.
- e. Tentang rasionalisasi di dalam NU, karena NU tumbuh dari kultural, bukan struktural sehingga kemampuan dan potensi kulturalnya lebih menonjol. Sisi positifnya adalah NU tidak akan mati walau dibiarkan. Namun kelemahannya, karena bingkai struktur belum baik, maka NU masih menjadi organisasi yang reaktif belum konseptual. Oleh karenanya, keseimbangan antara porsi kultur dan struktur harus dilakukan.
- f. Perlunya rekomendasi terhadap masalah bangsa yang paling mendesak, misalnya, soal ancaman disintegrasi bangsa. NU secara optimal harus diutuhkan untuk mengutuhkan kembali bangsa ini seberapa mungkin dan

seberapa bisa. Dengan demikian muktamar menjadi acuan untuk membangun kembali NU sekaligus menggunakan NU untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan.

3. Salahuddin Wahid (mantan Ketua PBNU)

Menekankan pentingnya islah atau rekonsiliasi antar keluarga besar Warga NU (*nahdliyyin*) untuk menyelesaikan kesenjangan, terutama antara kelompok NU Cipete dan NU Situbondo, warga NU di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan di luar PKB, NU Jawa dan Luar Jawa, dan kesenjangan generasi sepuh dan generasi muda. Menurut Gus Sholah, ada sembilan pilar yang harus dikembangkan untuk NU di masa mendatang yakni:

1. Penguatan NU di atas landasan dan spirit islah.
2. Peneguhan dan implementasi khittah NU 1926.
3. Peningkatan supremasi kepemimpinan ulama.
4. Implementasi NU sebagai jam'iyah berskala nasional.
5. Pemberdayaan potensi dan sumber daya NU.
6. Penguatan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan kelautan.
7. Gerakan *tajdid* atau reformasi dan demokratisasi dalam koridor ajaran Aswaja.
8. Pengembangan wawasan keulamaan yang berorientasi pada kerakyatan.
9. Pelaksanaan fungsi kemitraan yang kritis terhadap kekuasaan. (elKapim, 2000:18-21).

5.4.3. Tindakan-Tindakan Hasyim Muzadi Dalam Mencapai Ketua PBNU 1999-2004

Dalam mencapai tujuan tertentu, seseorang akan melakukan apapun demi mencapai tujuan tersebut. Begitu juga Hasyim Muzadi melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia terpilih sebagai Ketua PBNU 1999-2004. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan Hasyim Muzadi, penulis membagi menjadi 2 (dua) yakni; selama menjadi Ketua PWNU Jatim periode 1992-1997 dan 1997-2002 dan Pra Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim pada tanggal 21-26 Nopember 1999 sebagai berikut:

a. Tindakan Hasyim Muzadi sebagai Ketua PWNU Jatim

Tindakan-tindakan yang dilaksanakan Hasyim Muzadi sebagai Ketua PWNU Jatim periode 1992-1997 dan periode 1997-2002 adalah sebagai berikut:

Langkah awal yang dilakukan Hasyim Muzadi sebagai Ketua PWNU Jatim adalah menata visi dan cara pandang para pengurus serta pimpinan NU dalam berorganisasi. Ini dilakukan dengan menyelenggarakan orientasi dan *taaruf* di Universitas Sunan Giri Surabaya pada tanggal 17 Januari 1993, yang diikuti oleh seluruh pengurus wilayah hasil konferwil. Sementara, kegiatan serupa untuk seluruh pengurus cabang, dilakukan lewat penyelenggaraan Musyawarah Kerja I PCNU se-Jatim pada tanggal 26-27 September 1993.

Dalam Musker di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Bettet, Pamekasan, dilakukan upaya penyamaan visi, pembagian tugas, dan penyusunan prioritas program. Salah satunya, adalah penataan sarana organisasi, baik yang menyangkut

perangkat lunak (*soft ware*) maupun perangkat keras (*hard ware*). Selain itu, mencari metode yang tepat untuk menggerakkan dan mengaktifkan secara optimal kegiatan NU di tingkat cabang.

Sebagai tindak lanjut awal, PWNU Jatim melakukan renovasi kantor pengurus wilayah secara bertahap. Renovasi kantor PWNU Jatim yang berlokasi di Jalan Raya Darmo 96 Surabaya ini dilakukan karena tidak memenuhi syarat sebagai kantor wilayah. Menurut Hasyim Muzadi, pada saat itu kondisi gedung PWNU Jatim ibarat garasi milik tetangga, di kanan kiri kantor berdiri rumah dan kantor-kantor lain yang megah.

Renovasi kantor PWNU Jatim di bagi dalam dua tahap. *Pertama*, pembangunan gedung belakang berlantai dua, dengan luas bangunan 250 m². Lantai dua dipakai untuk aula pertemuan, sedangkan lantai satu dipetak-petak dan digunakan sebagai sekretariat atau kantor badan otonom NU. Masing-masing: PW GP Ansor, PW Fatayat NU, PW IPNU-IPPNU, IPSNU Pagar Nusa, LP2NU, Jamiyatul Qurra wal Hufazd, DPW Sarbumusi, LKK, Lakpesdam, dan Majalah Aula.

Pembangunan tahap awal di mulai sejak 1994 dan berakhir 1995, dengan total biaya Rp. 146 juta. Sedangkan tahap *kedua*, di mulai awal 1996. Pembangunan gedung yang seluruh ruangnya ber AC itu, berakhir pada bulan Nopember 1996 dengan biaya sekitar Rp. 550 Juta. Gedung depan dipakai untuk sekretariat induk, lembaga-lembaga NU (LDNU, LP Maarif NU, Perekonomian NU, LSMNU), Rabithah Maahid Islamiah, LPBHNU, Lajnah Ta'rif wan Nasyr, dan sekretariat NU. Sementara itu, untuk memudahkan komunikasi dan membuka akses informasi yang

seluas-luasnya kantor “baru” ini di lengkapi dengan interkom, faksimile, internet, dan perpustakaan.

Menurut Hasyim Muzadi, dana pembangunan kantor PWNU Jatim itu berasal dari tiga sumber. *Pertama*, sumbangan warga NU (*nahdliyyin*) yang di muat di Majalah Aula. *Kedua*, sumbangan warga NU melalui program Kartu Anggota NU (Kartanu). *Ketiga*, aset PWNU Jatim. Melihat asal usul dana pembangunan kantor PWNU Jatim menunjukkan kemandirian NU bisa kita wujudkan. Kantor PWNU Jatim diresmikan pada tanggal 1 Desember 1996.

Setelah selesai merapikan kantor PWNU Jatim, langkah Hasyim Muzadi berikutnya adalah melakukan orientasi sampai ke tingkat cabang. Tujuannya, agar pengurus cabang dapat melaksanakan program dan mengkoordinir *jamiyyahnya* hingga ke tingkat ranting. Untuk itu, Hasyim Muzadi bersama pengurus PWNU Jatim lainnya rajin turun ke bawah untuk memantau aktivitas di tingkat cabang. Sehingga, hubungan timbal balik antara pengurus cabang dan pengurus wilayah terbina dengan baik.

Kontinuitas dalam melakukan orientasi ini ternyata tidak hanya menghidupkan kembali api semangat berorganisasi, akan tetapi pengurus cabang pun ikut tergerak merenovasi kantornya masing-masing. Sehingga, hampir seluruh PCNU di Jatim sudah memiliki kantor sendiri.

Selain itu, PWNU Jatim menyelesaikan gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) NU Jatim, yang berlokasi di Ledok, Prigen, Pasuruan. Gedung yang berlantai tiga ini, dibangun di atas tanah seluas 3.000 m², wakaf dari keluarga H. Asnan Kusnoraharjo dan Hj. Siti Khodijah serta ahli waris. Gedung tersebut dimanfaatkan

sebagai pusat penggodokan dan menyiapkan sumber daya manusia NU dari berbagai disiplin ilmu. Kader-kader NU produk Diklat itu, akan ditransfer ke berbagai bidang, termasuk pemerintahan.

Menurut Hasyim Muzadi, Diklat ini mempunyai multifungsi. *Pertama*, sebagai tempat untuk melakukan orientasi penyamaan visi para pengurus NU se-Jatim dari semua tingkat. *Kedua*, sebagai sarana pendidikan dan latihan menuju terbentuknya kelompok menengah strategis, yang diharapkan mampu mengisi dan terlibat dalam dinamika masyarakat yang multidimensional melalui kecakapan/spesialisasi dan profesi masing-masing. *Ketiga*, sebagai sarana mendidik kader-kader pemimpin yang berkepribadian, berpandangan ke depan, dan bisa diterima masyarakat.

Proses menuju perwujudan fungsi-fungsi tersebut, terlebih dahulu harus di susun kurikulum Diklat dengan menghadirkan para ahli di bidang-bidang itu. Menurut Hasyim Muzadi, Diklat menjadi prioritas untuk menyamakan visi dan mengembangkan sumber daya manusia NU. Agar NU tidak menjadi satu komunitas yang selalu di pengaruhi, tetapi tidak mampu mempengaruhi. Di samping itu, menurut Hasyim Muzadi, fungsi Diklat juga penting agar warga NU tidak lagi rentan terhadap pertikaian, perpecahan, dan lainnya. (Baidlawi dkk, 1999:xxiii-xxvi).

Menurut Hasyim Muzadi, pada umumnya, warga yang menjadi pengurus NU sudah mengetahui dan memahami tentang pengamalan khittah, namun belum merata dipahami di kalangan tokoh non-struktural. Dan, inilah bukti bahwa memasyarakatkan khittah memang tidak mudah. Karena, dipicu oleh kultur tidak sehat di NU sendiri yang lebih menonjolkan dimensi kekeluarganya daripada

organisasinya. Tokoh-tokoh non-struktural itu tidak ubahnya seperti raja kecil yang memiliki kedaulatan sendiri, dengan kekuasaan yang sulit ditembus organisasi.

Dalam berbagai kesempatan pada saat turba ke daerah-daerah, Hasyim Muzadi menekankan perlunya kesadaran berorganisasi dan menciptakan kemandirian NU. Hasyim Muzadi berkeyakinan bahwa NU Jatim bisa disebut berhasil, manakala seluruh kepengurusan dari wilayah hingga ranting hidup. Dan ini ditunjukkan dengan aktif dan rutin menyelenggarakan pertemuan antar pengurus. Menurut Hasyim Muzadi, forum-forum semacam itu sangat bermanfaat, tidak hanya sebagai sarana konsolidasi, tetapi juga konsultasi dan pemecahan masalah di tingkat masing-masing. Sehingga, setiap persoalan yang menyangkut aspirasi politik bisa diminimalisir di antara para tokoh NU.

Menurut Hasyim Muzadi, soliditas *nahdliyyin* yang semakin kental di Jatim itu, dipertautkan dengan menggelar serangkaian kegiatan menyambut hari lahir NU ke-73. Selain bernuansa konsolidatif, penyempurnaan sarana dan prasarana, serta pengembangan wawasan ilmiah, PWNNU Jatim juga menyelenggarakan kegiatan spiritual berupa Istighasah Akbar. Untuk pertama kali, Istighasah Akbar I di gelar di Stadion 10 Nopember Tambaksari, Surabaya, pada tanggal 15 Desember 1996. Selain dihadiri seluruh pengurus NU dari tingkat wilayah hingga ranting, Istighasah Akbar I dihadiri tidak kurang dari satu juta umat.

Hasyim Muzadi mengatakan, kegiatan istighasah sangat penting untuk menjalin silaturahmi antar-pengurus dari semua tingkat dari perspektif organisasi. Lebih jauh, momentum istighasah ini dapat di jadikan sarana untuk mengecek keaktifan kepengurusan dari kegiatan yang selama ini dilakukan oleh wilayah. Jadi,

kegiatan istighasah bukan *show of force* warga NU (*nahdliyyin*), melainkan *moral force*, karena tujuannya adalah untuk membangun sikap kejujuran, keadilan, dan keteladanan.

Istighasah juga diniatkan untuk membangun hakiki kejiwaan, di samping memanjatkan doa keselamatan bagi warga NU, umat Islam, masyarakat, dan negara Indonesia pada umumnya, menurut ukuran etis-agamis. Istighasah tidak hanya diikuti oleh kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat. Pada titik ini, Hasyim Muzadi bisa dikatakan tokoh pemrakarsa kembalinya budaya istighasah, yang telah sekian lama dilupakan warga NU (*nahdliyyin*). Kini, istighasah telah menjadi bagian dari kegiatan rutin NU, khususnya setiap menghadapi masalah yang penting dan genting. Di Jatim, istighasah NU sudah tiga kali digelar. Dua yang terakhir diselenggarakan di lapangan Makodam V/Brawijaya. (Baidlawi dkk, 1999:xxix-xxx).

Di samping pembinaan ke dalam (*internal*), Hasyim Muzadi juga aktif membina hubungan kemitraan dengan pihak-pihak luar (*eksternal*) di Jatim. Untuk meningkatkan peran serta NU dalam pembangunan kemasyarakatan, dan menyukseskan program-program organisasi, Sebab NU tidak mungkin berjalan sendiri. Ia perlu bermitra, seraya mengajak pihak lain untuk ikut mendukung terlaksananya program-program NU. Dalam bingkai kepentingan itulah, sejak awal Hasyim aktif menjalin dan membina hubungan dengan berbagai pihak di Jatim. Mulai dari pejabat Pemprov Jatim, Pangdam Brawijaya, tokoh orsospol, hingga tokoh-tokoh dari semua agama.

Dalam bermitra dengan kalangan orsospol, PWNU Jatim mengacu pada parameter seperti yang digariskan dalam khittah dan tidak saling intervensi di

dalamnya. Dengan begitu, satu sama lain bisa saling menghormati dan menghargai dalam kerangka menjaga kemandirian masing-masing. Keakraban dengan para mitra ini terjalin erat, lantaran kedua pihak saling mengundang dan mendatangi sesuai kapasitas masing-masing. Salah satu problem NU yang sulit dijelaskan adalah persoalan yang berkaitan langsung dengan politik praktis. Sebabnya, sejarah terlanjur menorehkan catatan yang tidak memisahkan NU dengan politik. Persoalannya di sini adalah bagaimana agar persoalan politik itu tidak sampai mempengaruhi gerak langkah NU.

Dalam konteks go global, Hasyim Muzadi juga menjalin hubungan kemitraan dengan tokoh-tokoh luar negeri, khususnya kalangan diplomat dari kedutaan-kedutaan besar negara sahabat dan LSM. Sudah puluhan tamu asing, termasuk wartawan dan peneliti yang datang ke kantor PWNNU Jatim maupun yang berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam-Malang. Mereka antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Singapura. Selain berdiskusi, para tamu umumnya mencari informasi seputar masalah HAM, demokrasi, hubungan antarumat beragama, kerusuhan di Indonesia, serta bagaimana peran NU dengan isu-isu tersebut.

Hasyim Muzadi juga membuka akses dan jaringan dengan mitra asing, tidak cukup hanya menerima kunjungan. Dalam beberapa kesempatan, Hasyim sendiri melakukan kunjungan balasan ke luar negeri. Negara-negara yang pernah dikunjungi, antara lain: Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Selain membawa misi organisasi untuk menjalin kerja sama internasional, juga untuk mengamati langsung kondisi riil suatu negara beserta isu-isu strategis yang mengelilinginya. (Baidlawi dkk, 1999:xxxii-xxxiii).

b. Tindakan Hasyim Muzadi Pra Mukhtamar Lirboyo

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan Hasyim Muzadi Pra Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim dalam mencapai jabatan Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebagai berikut:

1. Peluncuran buku berjudul: KH. Hasyim Muzadi: *"Membangun NU Pasca Gus Dur"* (Dari Sunan Bonang sampai Paman Sam).
 - a) Pada 17 Nopember 1999 di Jakarta (tahap pertama) yang pada waktu itu dihadiri Ketua Umum PKB Matori Abdul Djali. Dalam peluncuran buku tersebut Hasyim Muzadi mengeluarkan pernyataan bahwa warga masyarakat utamanya umat NU tidak menyamakan NU dengan Gus Dur yang sedang mengemban sebagai Presiden RI. Menurut Hasyim bahwa kalau ada orang NU masih mengkalim pada Gus Dur, maka mulai saat itu harus dihentikan.
 - b) Pada 19 Nopember 1999 di Hotel Simpang Surabaya (tahap kedua) yang dihadiri ratusan tokoh masyarakat dan pemerintah, pada saat ini pun Hasyim menegaskan bahwa warga NU (*nahdliyyin*) hormat kepada pimpinan, itu masalah etika dan sama sekali bukan masalah organisasi (*jam'iyah*) atau kenegaraan. Keputusan Gus Dur sebagai presiden, tidak bisa dianggap sebagai keputusan NU. NU wajib tetap kritis kepada Presiden Gus Dur. (elKapim, 2000:xxx-xxxii).
2. Mengadakan pengajian bersama Isra' Mi'raj dan tasyakuran pasca Sidang Umum MPR, di Gedung Surabaya Indah antara PWNU Jatim dan DPW Muhammadiyah Jatim yang dihadiri Ketua PWNU Jatim Hasyim Muzadi, Ketua PW Muhammadiyah Jatim Abdurrahim Nur, Rais Syariah NU Jatim Imron Hamzah,

mantan Gubernur Jatim Basofi Soedirman dan Ketua MPR RI Amien Rais pada tanggal 14 Nopember 1999. (elKapim, 2000:6).

3. Melakukan kampanye pers (*press campaign*) dengan Suara Pembaruan pada tanggal 15 Nopember 1999. Hasyim Muzadi menegaskan, jika dipercaya memimpin PBNU nantinya tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan, meskipun presidennya adalah Gus Dur yang nota bene adalah 'orang NU'. (elKapim, 2000:7-8).
4. Menghadiri deklarasi ISNU (Ikatan Sarjana NU) di Surabaya pada tanggal 19 Nopember 1999, dalam kesempatan itu Hasyim Muzadi mengatakan NU sebagai jam'iyah akan tetap kritis dan proporsional terhadap seluruh kebijakan pemerintah, kendati Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah orang NU dan kebetulan masih menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. (elKapim, 2000:13).

5.4.4. Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004

A. Sahal Mahfudz, Fakhruddin Masturo, dan Hasyim Muzadi dipilih sebagai tiga serangkai pengurus NU masa khidmat 1999-2004. Posisi masing-masing sebagai Rais Aam, Wakil Rais Aam PBNU dan ketua umum PBNU *Tanfidziyah* (eksekutif). Mereka dipilih dalam proses pemilihan sendiri-sendiri pada sidang pleno ke-13 Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, pada hari Kamis, 25 Nopember 1999, pukul 19.30 sampai Jum'at pukul 08.30 pagi.

Waktu yang diperlukan untuk ketiga pemilihan pimpinan teras PBNU ini merupakan rekor baru, sekitar 13 jam. *Muktamirin* (peserta muktamar) tetap bersemangat tanpa menunjukkan lelah dan kantuk.

Walaupun dalam sidang tersebut di sana-sini ada riak-riak di antara *muktamirin*, tetapi semua itu merupakan logika dari dinamika cara NU bermuktamar. Suatu hal yang khas NU, pimpinan sidang di protes *muktamirin* ketika sekitar pukul 03.00 Jum'at, 26 Nopember 1999 menyatakan sidang diskors, dan pemilihan ketua umum PBNU dilaksanakan pagi harinya. *Muktamirin* menegaskan agar semua proses pemilihan harus sesuai dengan pasal 30 Peraturan Tata Tertib (Tatib), yaitu: Pemilihan PBNU dilakukan dua tahap: a. Tahap pencalonan b. Tahap pemilihan.

Kedua tahapan pemilihan ini dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menuliskan nama calon di kartu suara. Setelah kartu suara masuk, pimpinan sidang menghitung jumlahnya, membaca nama yang tertulis di kartu satu demi satu, dan menuliskannya di atas papan yang disediakan khusus untuk itu. Seorang calon dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya 40 suara. Apabila jumlah calon yang sah hanya satu (*tunggal*), pimpinan sidang dapat meminta kepada sidang untuk menerima dan menetapkan calon tersebut secara bulat (*aklamasi*).

Pada tahap pencalonan Kiai Sahal Mahfudz meraih 288 dari 326 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah, dan sisanya dibagi kepada 16 kandidat lainnya yang diusulkan *muktamirin*. Setelah hasil pencalonan diumumkan, ketua sidang menawarkan agar Kiai Sahal Mahfudz diputuskan secara aklamasi dan langsung disetujui.

Pemilihan Wakil Rais Aam prosesnya juga sama. Penjaringan calon memunculkan 30 nama yang diusulkan floor. Kiai Fakhruddin Masturo (Pengasuh Ponpes Tipar, Sukabumi, Jabar) mendapat 133 dari 306 suara. Dari 29 nama lain, Kiai Abdullah Faqih (Pengasuh Ponpes Langitan Tuban) meraih 26 suara dan Said Aqiel Munawar (Wakil Katib Aam PBNU) mendapat 24 suara, berarti tidak memenuhi syarat untuk pencalonan. Dengan demikian Kiai Fakhruddin Masturo disetujui secara aklamasi.

Proses penjaringan calon ketua umum PBNU 1999-2004 tidak berbeda, tetapi ada proses lain yang harus dilewati sebelum dilakukan pemilihan. Hasil penjaringan muncul tujuh nama. Tiga nama yang memenuhi persyaratan Hasyim Muzadi (Ketua PWNU Jatim) meraih 149 dari 326 suara bersaing dengan Said Aqiel Siradj (Rais Syuriah PBNU 1994-1999) mendapat 72 suara, dan Salahuddin Wahid diusulkan 56 cabang. Empat nama lainnya adalah Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU 1994-1999) memperoleh 22 suara, Mustofa Bisri (Rais Syuriah PBNU 1994-1999) meraih 21 suara, M. Wahab dan Husnan masing-masing 1 suara. Sidang kemudian diskors untuk shalat Subuh.

Hasil perolehan suara pada tahap pencalonan Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.5
Hasil Perolehan Suara Pada Tahap Pencalonan Ketua Umum PBNU 1999-2004

Hasil Perolehan Suara Tahap Pencalonan Ketua Umum PBNU 1999-2004		
no.	N a m a	Perolehan Suara
1.	Hasyim Muzadi	149
2.	Said Aqiel Siradj	72
3.	Salahuddin Wahid	56
4.	Ahmad Bagdja	22
5.	Mustofa Bisri	21
6.	M. Wahab	1
7.	Husnan	1
Jumlah Suara Keseluruhan		322

Sumber: *Kompas*, *Beginilah Cara NU Memilih Pemimpin*, 27 Nopember 1999, hal.7.

Sidang yang dipimpin oleh Husen Habibu (Sulteng) dibuka kembali pukul 06.00 WIB setelah Rais Aam terpilih Kiai Sahal Mahfudz hadir di arena muktamar. Dan Wakil Rais Aam terpilih Kiai Fakhruddin Masturo ditunggu pula oleh *muktamirin* karena ada proses lanjutan yang ia hadiri. Pasal 28 huruf b peraturan Tatib menentukan, *“Ketua umum PBNU dipilih secara langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi ketua umum memperoleh persetujuan dari Rais ‘Aam dan Wakil Rais ‘Aam terpilih.”*

Akhirnya, Rais Aam Kiai Sahal Mahfudz minta izin kepada sidang pleno untuk sekaligus bertindak “atas nama” Wakil Rais ‘Aam, memberikan persetujuan atas tiga orang calon yang memenuhi syarat untuk dipilih.

Setelah kartu suara dibagikan dengan menunggu satu per satu cabang, Salahuddin Wahid menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. Akhirnya, dalam perhitungan suara yang berakhir pukul 08.42 WIB, Hasyim Muzadi meraih 205 dari

323 suara, Said Aqiel Siradj mendapat 105, tiga suara tidak sah karena tertulis nama Salahuddin Wahid dan satu suara abstain.

Hasil perolehan suara pada tahap pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.6
Hasil Perolehan Suara Pada Tahap Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004

Hasil Perolehan Suara Tahap Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004		
No.	N a m a	Perolehan Suara
1.	Hasyim Muzadi	205
2.	Said Aqiel Siradj	105
Jumlah Suara Keseluruhan		310

Sumber: *Kompas, Begmilah Cara NU Memilih Pemimpin*, 27 Nopember 1999, hal.7.

Dari hasil pemilihan ini saya menjadi orang yang terpilih, tetapi bukan orang yang terbaik. Yang terbaik adalah hamba-hamba Allah SWT, yang memelihara NU tetapi sedikitpun tidak menghendaki apa-apa dari NU. Demikian kata-kata pertama kali diucapkan Hasyim Muzadi ketika terpilih sebagai Ketua PBNU 1999-2004.

Setelah Hasyim Muzadi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 1999-2004 mengalahkan rival kuatnya Said Aqiel Siradj dalam Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim dengan perbandingan suara 215:105, maka program yang diprioritaskan Hasyim Muzadi dalam kepengurusan PBNU 1999-2004 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.7
Program Hasyim Muzadi Pasca Terpilih
Sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004

No.	Program Hasyim Muzadi Pasca Terpilih Sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004
1.	<p>Silaturahmi ke beberapa tokoh NU yakni:</p> <p>a. KH. Idham Chalid (sesepuh NU, yang mantan ketua umum PBNU) Kunjungan ke KH. Idham Chalid di bilangan Cipete, Jakarta ini, untuk merangkul kelompok-kelompok yang bertikai dalam NU, sehingga kerja kepemimpinan PBNU di masa yang akan datang mudah berjalan untuk mewujudkan keutuhan <i>jam'iyah</i> NU. selain itu, mohon restu kiai Idham Chalid, agar kepengurusan PBNU di masa mendatang bisa berjalan sesuai amanat yang diberikan muktamar.</p> <p>b. II. Chalid Mawardi (mantan ketua PBNU, yang terakhir aktif di Golkar). Kunjungan ke Chalid Mawardi ini, karena semasa muda dipertemukan dalam PMII dan GP Ansor. Pada kunjungan Hasyim Muzadi ini, Chalid Mawardi menilai bahwa PBNU di bawah kepemimpinan Hasyim Muzadi merupakan komposisi yang melahirkan sosok-sosok baru. Dengan wajah baru ini, bisa diharapkan bisa mengakhiri adanya kelompok-kelompok yang saling bertikai. Kepemimpinan PBNU sekarang jauh dari tarik-menarik kelompok yang bertikai itu.</p>
2.	<p>Memenuhi undangan khusus sebagai pembicara dalam acara pindah rumah Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah menjabat orang nomor dua negeri ini, Mega yang sebelumnya tinggal di bilangan Kabagusan Jakarta, pindah ke Wisma Wapres di Jl. Diponegoro.</p>
3.	<p>Pada pertengahan Ramadhan 1420/1999, mengajak seluruh pengurus Syuriah PBNU dan Rais-rai Syuriah wilayah se-Indonesia menunaikan ibadah umroh, hal ini dilakukan untuk membangun NU melalui berdo'a mohon petunjuk kepada Allah bagaimana cara mengembangkan umat melalui NU.</p>
4.	<p>Setelah hari raya kupatan (10 Syawal), merencanakan akan turba se seluruh Indonesia, dengan skala prioritas luar Jawa. Tujuannya untuk mencari masukan sekaligus pemetaan terhadap masalah dan potensi NU dan dalam setahun akan menyelenggarakan dua kali rapat koordinasi nasional untuk mengetahui keadaan dan perkembangan NU di daerah-daerah.</p>
5.	<p>Untuk mengatur rumusan-rumusan start, sehingga saya harapkan NU seluruh Indonesia akan berkembang, dan <i>take off</i> mulai tahun 2001. tahun 2000, kita pakai untuk konsolidasi intern, termasuk agar persoalan intern bisa diselesaikan dengan tuntas.</p>
6.	<p>Dari rekomendasi (<i>tausyiah</i>) yang dihasilkan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, yang lebih dulu saya prioritaskan adalah bagaimana menghentikan disintegrasi bangsa, baru masalah ekonomi dan politik, kemudian masalah yang menyangkut hukum</p>
7.	<p>sikap yang akan saya kembangkan terhadap minoritas, kita mempunyai hubungan</p>

kebangsaan yang sangat erat dengan mereka, kita tetap bekerja sama, bahkan kalau bisa mengayomi mereka, sesuai dengan hak-hak mereka berdemokrasi dan beragama.

Sumber:

1. **Kompas**, *Beginilah Cara NU Memilih Pemimpin*, 27 Nopember 1999, hal. 7.
2. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: elKapim, hal. 42-44.
3. **Aula**, *Wawancara dengan Hasyim Muzadi: Perioritas Utama, NU Luar Jawa*, No. 10 Tahun XXI, 1999, hal. 30.

Adapun susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1999-2004 hasil Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.8
Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 1999-2004
Hasil Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim

Susunan Personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 1999-2004 Hasil Mukhtamar NU Ke-30 Di Lirboyo-Kediri-Jatim	
A. MUSTASYAR	
1.	KH. M. Ilyas Ruchiyat
2.	KH. Abdullah Faqih
3.	KH. Abdurrahman Wahid
4.	KH. Abdullah Abbas
5.	KH. Tuan Guru Muhammad Turmudzi Badruddin (NTB)
6.	KH. Haderani HN (Kalteng)
7.	KH. M. Sanusi Baco
8.	KH. Syech Muchtar Muda Nasution
9.	KH. A. Idris Marzuki
B. SYURIYAH	
1.	Rais Aam : KH. MA. Sahal Mahfudz
2.	Wakil Rais Aam : KH. Endin Fachruddin Masthuro
3.	Rais : KH. A. Musthofa Bisri

- | | |
|---------------------|--|
| 4. Rais | : KH. Abd. Muchit Muzadi |
| 5. Rais | : KH. M. Imron Hamzah |
| 6. Rais | : Prof. DR. KH. Said Aqiel Siradj, MA |
| 7. Rais | : KH. M. Irfan Zidny, MA |
| 8. Rais | : Prof. DR. KH. Chatibul Umam |
| 9. Rais | : KH. Muhammad Anis Fuad Hasjim |
| 10. Rais | : KH. A. Hafidz Ustman |
| 11. Rais | : KH. M. Abdillah Al-Djufri (Sulteng) |
| 12. Rais | : KH. Tuan Guru Nuruddin Husni Kallah, MA. (NTB) |
| 13. Katib Aam
MA | : Prof. DR. KH. Sayid Agil Husin Al-Munawar, LC,
MA |
| 14. Wakil Katib | : Drs. H. Masdar F. Mas'udi, MA |
| 15. Wakil Katib | : DR. KH. Manarul Hidayat |
| 16. Wakil Katib | : H. M. Fachri Thaha Ma'ruf, LC |

C. A'WAN

1. KH. Habib Hamid bin Alwi Alatas
2. KH. Habib Luthfy bin Yahya
3. KH. Habib Dr. Abd. Kadir Al Habsy
4. KH. Prof. Dr. Abd. Moeiz Kabry
5. KH. Dr. Mansur Nasution
6. KH. Habib Abdullah Assegaff, MA
7. KH. Abd. Rahman Chudlori
8. KH. Ahmad Warsun Munawir, SH
9. KH. M. Syukri Unus
10. KH. Drs. Abd. Fattah Ghozali, SH
11. KH. Arifin Khan
12. KH. Ibnu Ubaidillah Syathari
13. KH. Drs. Abd. Warist Ilyas
14. KH. Drs. Chasbullah Badawi
15. KH. Ubaidillah Isa
16. KH. Dimiyati Rois
17. KH. Otong Nawawi
18. KH. Luthfy Hakim
19. KH. Drs. Abd. Rochim Hasan
20. Prof. DR. Hj. Chuzaimah Y. Tanggo, MA
21. Dra. Hj. Mursyidah Thohir, MA

D. TANFIDZIYAH

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua Umum | : H. A. Hasyim Muzadi |
| 2. Ketua | : Ir. H. Kemas Madani Idrus |
| 3. Ketua | : Drs. KH. Abdul Wahid Zaini, SH |
| 4. Ketua | : H. M. Rozy Munir, SE, MSc |
| 5. Ketua | : Ir. H. Musthafa Zuhad Mughni |
| 6. Ketua | : Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin, MED |

7. Ketua	: H. M. Fajrul Falaakh, SH, MA, MSc
8. Ketua	: H. Achmad Bagdja
9. Ketua	: Ir. H. Sholahuddin Wahid
10. Ketua	: H. M. Rusli, MBA
11. Ketua	: Prof. Dr. H. Achmad Rifa'i Siregar
12. Ketua	: DR. H. Andi Djamaro Dulung, Msi
13. Sekjen	: H. Muhyiddin Arubusman
14. Wakil Sekjen	: Drs. H. Abdul Aziz, MA
15. Wakil Sekjen	: Drs. H. Masduki Baidlawi
16. Wakil Sekjen	: Drs. H. Hilmy Muhammadiyah
17. Wakil Sekjen	: Drs. H. Taufiq R. Abdullah
18. Bendahara	: H. Abdullah Machrus
19. Wakil Bendahara	: Drs. Ronin Hidayat
20. Wakil Bendahara	: H. Fauzi Noor, BA
21. Wakil Bendahara	: H. Masnuh

Sumber:

1. **Hasil-hasil Muktamar XXX NU**, (2000). *Lampiran Keputusan Muktamar XXX NU Nomor: 011/MNU-30/11/1999: Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 1999-2004 Hasil Muktamar XXX NU Di Lirboyo Kediri Jawa Timur*. Jakarta: PBNU.
2. **Aula**, *Susunan Personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 1999-2004*, No. 10 Tahun XXI, 1999, hal. 43-44.
3. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: elKapim, hal. xxxvi-xxxvii.

5.4.5. Biografi Hasyim Muzadi: Ketua Umum PBNU 1999-2004 Terpilih

Melacak biografi Hasyim Muzadi tidak sesulit melacak biografi tokoh-tokoh NU lain, ini disebabkan peneliti dapat bertemu dan mewawancarai secara langsung di rumahnya Malang, pada Selasa, 26 Nopember 2002 Pukul: 21.00-22.00 WIB. Hasil wawancara tersebut, peneliti korelasikan dengan berbagai pemberitaan yaitu: buku, majalah, koran yang memuat biografi Hasyim Muzadi.

Melihat rekaman kehidupannya dari berbagai sumber, Hasyim Muzadi mampu membuktikan membangun karier dalam berorganisasi atas dasar prestasi,

bukan karena tradisi mewarisi. Lewat Mukhtamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien, Lirboyo, Kediri, Jum'at 26 Nopember 1999, ia dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara mutlak, menggantikan Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi Presiden ke-4 RI. (Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (eKapim), 2000:42),

Kehidupan serba tak berkecukupan pada masa kecil menempa Hasyim Muzadi, kelahiran Bangilan, Tuban, 8 Agustus 1944, menjadi pribadi yang pantang menyerah. Tidak mengherankan kalau anak ketujuh dari delapan bersaudara pasangan Muzadi-Rumiyati ini, mencanangkan kalimat: *"Tiada Hari Tanpa Perjuangan"*, sebagai motto dalam hidupnya.

Rendah hati Hasyim menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di kota kelahirannya, dengan bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Bangilan, dan melanjutkan ke SMP Tuban. Lulus SMP, ia dikirim orang tuanya belajar di berbagai pesantren, yakni Kuliyyatul Muallimin Islamiyah (KMI) di Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, dan Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Lasem.

Di Pesantren Gontor enam tahun, sampai tamat 1962. kemudian dari pesantren ke pesantren lain, tiap tiga bulan, pindah sana pindah sini. Hasyim mulai menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat bagi pemuda seusianya. Dari situ tertempa semangat kepemimpinan dan kepekaannya. Satu hal yang disadari adik A. Muchid Muzadi, Rais Syuriah PBNU periode 1994-1999 itu, ia harus mereguk ilmu setinggi-tingginya. Kesadaran itu mendorongnya melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Pilihannya, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Malang. Ia masuk pada 1964.

Semangat kepemimpinannya mulai terasa ketika terjun ke dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia dipercaya menjabat ketua PMII Cabang Malang, periode 1969-1973. pada saat yang sama, ia sekaligus menjabat ketua GP (Gerakan Pemuda) Ansor Malang. Melihat prestasinya, ia dipercaya menjabat ketua GP Ansor Jatim 1986-1991. keseriusan berorganisasi sempat mengantarnya mengikuti perkemahan pemuda Islam sedunia di Cairo, Mesir.

Menikah dengan Ny Muthomimah, asal Tuban, Hasyim Muzadi dikaruniai enam anak, Abdullah Hakim Hidayat, Yuni Arofah, Hilman Hidayat, Afi Rahmawati, Laili Abidah, dan Yusron Sidqi.

Pengangkatan sosok yang akrab dipanggil Cak Hasyim itu sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 1999-2004, tidaklah mengagetkan. Ia menjadi pengurus NU mulai dari tingkatan paling bawah, sebagai ketua Ranting NU Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, lalu merangkak menjadi Ketua Cabang NU Kota Malang, hingga wakil Ketua PWNU Jawa Timur.

Namanya mulai dikenal luas ketika menjadi Ketua NU Wilayah (Pengurus Wilayah NU-PWNU) Jatim, 1992-1997, dan periode berikutnya, 1997-2001. bukan hanya di bidang organisasi kemasyarakatan, Hasyim juga terjun ke organisasi sosial-politik. Ia mengawalinya dengan menjadi Ketua Ranting Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dinoyo, kemudian menjadi Ketua Fraksi PPP Malang. Kedudukan itu mengantarnya menjadi anggota DPRD I Jawa Timur.

Pada 1989, Hasyim memutuskan turun dari panggung politik, dari kepengurusan PPP. Namun demikian, ketika sebagian warga NU mendeklarasikan

berdirinya Partai Kebangsaan Bangsa (PKB), namanya tercatat sebagai partisan aktif. (elKapim, 2000:49-52),

Hasyim Muzadi merupakan kader NU yang langka. Disebut langka, karena ia benar-benar aktif di NU sejak di ranting hingga menjadi Ketua Umum PBNU. Aktifitas ke-NU-an pria kelahiran Tuban 8 Agustus 1944 ini dimulai saat ia menjadi Ketua Ranting GP Ansor Bululawang Malang, Ketua Ancab GP Ansor Bululawang Malang, Ketua cabang GP Ansor Malang, Ketua PW GP Ansor Jatim, salah satu Ketua GP Ansor sampai menjadi Ketua PWNU Jatim. Sebagai ketua PWNU Jatim Hasyim berhasil secara signifikan menggerakkan kepengurusan NU Jatim hingga badan-badan otonomnya. Dan satu hal yang patut dicatat, pada pemilu 1999 lalu, Jatim menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional. Bahkan Hasyim sukses dua kali memimpin NU Jatim. (Aula, *Perioritas utama, NU Luar Jawa*, No. 10 Tahun XXI, 1999, hal. 29-30). Hasyim Muzadi juga mampu membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan (*jamiyyah ijtimaiyyah diniyah*) yang mandiri dan sekaligus mampu memberikan pencerahan dalam pengelolaan organisasi secara profesional. (Baidlawi, 1999:xvii). Ini bisa dilihat, meningkatnya wawasan organisasi para pengurus dan kadernya, berikut kemampuan dalam melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif, dalam bingkai semangat mengedepankan kebaikan umat (*mabadi' khaira ummah*).

Adapun biografi Hasyim Muzadi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.9
Biografi Hasyim Muzadi

Biografi Hasyim Muzadi Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam- Malang- Jawa Timur	
NAMA	A. HASYIM MUZADI
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	Tuban, 8 Agustus 1944
NAMA ORANG TUA	Muzadi-Rumyati
ISTRI	Muthomimah
ANAK	1. Abdullah Hakim Hidayat 2. Yuni Arofah 3. Hilman Hidayat 4. Alfi Rahmawati 5. Laili Abidah 6. Yusron Sidqi
KEBANGSAAN	Indonesia
PENGALAMAN JABATAN	1. Ketua PMII Cabang Malang (1969-1973). 2. Ketua Departemen Dakwah PMII (1970). 3. Anggota DPRD Tk. II Malang dari PPP (1972-1982). 4. Anggota DPR I Jawa Timur (1984-1987). 5. Ketua PP GP. Ansor (1985-1990). 6. Ketua Ansor Jawa Timur (1986). 7. Sekretaris PWNu Jawa Timur (1989). 8. Wakil Ketua PWNu Jawa Timur (1990-1992). 9. Ketua PWNu Jawa Timur (1992-1997) dan (1997-2002, berjalan sampai 1999). 10. Ketua Umum PBNU (1999-2004).
PENDIDIKAN	1. 1963, lulus dari PP Gontor, Jawa Timur 2. 1967, lulus dari IAIN Malang
BAHASA YANG DIKUASAI	1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Jawa 3. Bahasa Arab 4. Bahasa Inggris Terbatas
PERJALANAN KE LUAR NEGERI	Mesir, Arab Saudi, Malaysia, Jepang, Belanda, Amerika, dan Vatikan.
MINAT DAN KESENANGAN	Badminton dan Pingpong
PRESTASI DI NU	1. Berhasil secara signifikan menggerakkan kepengurusan NU Jawa Timur hingga badan-badan otonomnya, 2. Pada pemilu 1999 lalu, Jawa Timur menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sukses dua kali memimpin NU Jawa Timur. (Aula, 1999:29-30). 4. Hasyim Muzadi juga mampu membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan (<i>jamiyyah ijtimaiyyah diniyah</i>) yang mandiri dan sekaligus mampu memberikan pencerahan dalam pengelolaan organisasi secara profesional. (Baidlawi, 1999:xvii). Ini bisa dilihat, meningkatnya wawasan organisasi para pengurus dan kadernya, berikut kemampuan dalam melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif, dalam bingkai semangat mengedepankan kebaikan umat (<i>mabadi' khaira ummah</i>). 5. PWNU Jatim dibawah kepemimpinan Hasyim kinerjanya semakin baik dan memiliki karakteristik organisasi yang jelas. Dari aspek manajerial, PWNU Jatim dikelola lebih profesional. Kerja kejamiyyahan lebih diutamakan dan berusaha menghindari keterlibatan secara vulgar dengan dunia politik. Program kerja organisasi tersusun rapi, dengan wawasan jauh ke depan. (Baidlawi, 1999:xxiii).
ALAMAT SURAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Cengger Ayam Nomor 5, Malang, Jawa Timur. 2. Kantor PBNU Jalan H. Agus Salim No. 112 Jakarta 10350. Telp. (021) 336250

Sumber:

1. **Baidlawi, Masduki dkk**, (1999). *H. A. Hasyim Muzadi Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo, hal. 140.
2. **Aula**, (1999). *Wawancara dengan KH. Hasyim Muzadi: Prioritas Utama, NU Luar Jawa*. Surabaya: PWNU Jatim, No. 10 Tahun XXI, Romadlon 1420, hal. 29-30.
3. **FORUM Keadilan: K.H. Hasyim Muzadi: "Waktu Orde Baru, NU adalah Golkar Jilid Satu"**. No. 35, 5 Desember 1999, hal. 19.
4. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: elKapim, hal. 49-52.

5.4.6. Kelompok Yang Tidak Puas Bentuk PBNU Tandingan

Terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU 1999-2004, membuat kecewa Generasi Muda NU (GMNU). Mereka memproklamirkan diri sebagai oposisi dan membentuk kabinet *tanfidziyah* (eksekutif) tandingan diketuai Chotibul Umam Wiranu.

Pada hari Jum'at 26 Nopember 1999, ketua Generasi Muda NU (GMNU) Munasir Huda mengatakan, bahwa GMNU merasa prihatin atas terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU.

GMNU menilai, Hasyim Muzadi lebih menonjol sikap politisnya, daripada sikap kulturnya. Hal itu ditunjukkan dengan manuver-manuvernya yang sering tidak sesuai dengan kultur NU.

Munasir menjelaskan, dengan *tanfidziyah* tandingan itu, pihaknya akan mengontrol setiap langkah yang diambil Hasyim Muzadi dalam menjalankan roda organisasi NU. Kontrol itu bisa berupa saran, kritik langsung atau dalam bentuk lainnya.

Selain itu, menurut Munasir, GMNU merasa khawatir Hasyim Muzadi akan menjadi beban bagi pemerintahan Gus Dur, bukan sebagaimana harapan semua pihak, bahwa organisasi terbesar di Indonesia itu akan mampu meringankan kerja Gus Dur (mantan ketua umum PBNU itu).

GMNU mengingatkan, agar Hasyim Muzadi tidak menjadikan *tanfidziyah* sebagai institusi politik, yang akan dijadikan sebagai mesin politik para pengurusnya, sehingga yang dikerjakan hanya politik praktis dan NU akan jadi Golkar dengan wajah yang lain di era pemerintahan Gus Dur.

Adapun susunan PBNU Tandingan versi Generasi Muda NU (GMNU), sebagaimana yang dapat kita ketahui dalam tabel berikut:

Tabel 5.10
Susunan PBNU Tandingan Versi Generasi Muda NU (GMNU)

Susunan Personalia PBNU TANDINGAN Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim	
1. Rais Aam	M. Fajrul Falaakh
2. Wakil Rais Aam	Masykuri Abdillah
3. Rais	Ulil Absor Abdalla, M. Imam Azis, Ronin Hidayat, Kacung Marijan.
4. Katib Aam	Andy Muaqwiyah Ramli.
5. Wakil Katib Aam	Syamsul Hadi
6. Ketua Umum	Chotibul Umam Wiranu, Hairus Salim, M. Muzamil, Suwandi D. Pranoto, Ngatawi Al-Zastrow, Usman Sadiqin, Hilmy Faisal, Galih F. Qurbani, Maulidin, Luluk Nurhamidah.
7. Sekjen	A. Basso.
8. Wakjen	M. Imadudu Rahmat, Cupli.
9. Bendahara Umum	Syafiq Hasyim.
10. Wakil Bendahara Umum	Husnul Khatimah.

Sumber: Surya, *GMNU Bentuk PBNU Tandingan*, 27 Nopember 1999, hal. 16.

5.5. Analisis

Melihat konflik yang terjadi antar tim sukses kandidat kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004 Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj dalam Muktamar NU ke-30

di Lirboyo-Kediri-Jatim tersebut, kemudian penulis analisis dengan pendekatan teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori strukturalis, dan teori aksi.

Konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara, dengan asumsi masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeda. (Surbakti, 1992:149-150).

Dari sini, dapat kita pahami bahwa masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber yang sama, dengan jalan usaha, perjuangan, dan pengorbanan.

Dalam penelitian ini, ada beberapa sudut pandang yang akan dijelaskan penulis dalam konflik antar tim sukses kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004, yaitu penyebab konflik, tipe konflik, struktur konflik, tujuan konflik, dan intensitas konflik.

1. Penyebab Konflik

Menurut Paul Conn, pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal, yakni kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. (Surbakti, 1992:151-152).

Menurut Nasikun (2003:28), bahwa struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan 2 (dua) ciri yang bersifat unik. *Pertama*, secara horisontal ialah ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku

bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan
Kedua, secara vertikal ialah struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat *majemuk*, suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Sebagaimana menurut Furnivall yang dikutip Nasikun (2003:29), bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik. Sebagai *masyarakat majemuk*, masyarakat Indonesia ia sebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas, kendati jumlahnya semakin semakin bertambah-tambah terutama pada akhir abad ke-19, sekaligus penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi (baca: golongan Pribumi) yang menjadi warga negara kelas tiga dinegerinya sendiri. Golongan orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas.

Menurut Cyril S. Belshaw dikutip Nasikun (2003:32), menyimpulkan dari konsep Furnivall, bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana

sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Meminjam istilah Clifford Geertz, yang dikutip Nasikun (2003:33), bahwa masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat *primordial*.

Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. Van den Berghe sebagaimana yang dikutip Nasikun (2003:33), menyebutkan beberapa karakteristik berikut sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni:

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplemeniter.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
4. Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Jadi penyebab konflik antar tim sukses kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 adalah konflik kemajemukan vertikal, yakni struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas (golongan kiai nasab) dan lapisan bawah (golongan kiai nasib) yang cukup tajam. Di mana, tim sukses antar kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dan *muktamirin* menghendaki agar pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 berjalan secara demokratis dan sesuai dengan mekanisme tata tertib pemilihan.

2. Tipe konflik

Menurut Paul Conn, konflik politik dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe konflik. Kedua tipe konflik ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. (Surbakti, 1992:153). *Pertama*, yang dimaksud dengan konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme (lembaga-lembaga demokrasi) penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers dan forum-forum terbuka yang lain. Sebaliknya, *kedua*, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Berkaitan dengan kedua tipe konflik ini, maka masyarakat dikelompokkan menjadi masyarakat yang mapan dan masyarakat yang belum mapan. Masyarakat yang mapan memiliki dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur konstitusi. Masyarakat yang belum mapan, belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat.

Sedangkan tipe konflik politik dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim termasuk tipe konflik peralihan dari tipe konflik negatif menuju tipe konflik positif. Pada tipe konflik peralihan ini, masyarakat dalam proses menuju kemapanan, yang memiliki dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur konstitusi. Yang mana, tim sukses antar kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang berkonflik, sebagian masih menggunakan cara-cara perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan yang tidak sehat misalnya, manuver politik, isu *money politics*, isu tidak adanya nasab kiai, perang klaim pendukung antar kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004, dan adanya selebaran yang sifatnya mengejek dan mengklaim calon lain yang berbunyi: "Pilihlah pemimpin NU yang tidak pernah masuk ke Gereja dan tidak pernah berbau Wahabi".

Konflik politik dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati bersama dalam konstitusi. Penyelesaian konflik antar tim sukses kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 melalui pihak kultural NU (kiai sepuh), di mana beberapa jam sebelum berlangsungnya pemilihan ketua umum PBNU suasana kian memanas. Hal ini membuat para kiai sepuh prihatin. Karena itu hari Kamis pada 25

Nopember 1999, 14 kiai sepuh mengadakan pertemuan, menyusul keprihatinan mereka terhadap selebaran dan isu *money politics* dalam arena Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim yang semakin semarak.

Pertemuan yang diprakarsai Kiai Idris Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri-Jatim itu melahirkan pernyataan yang ditanda tangani para kiai sepuh. Isinya, mereka menyesalkan semakin maraknya isu *money politics*. *Tanbih* (peringatan) tersebut menegaskan, cara-cara yang dilakukan itu sangat bertentangan dengan etika dan budaya NU.

Ke-14 kiai sepuh tersebut adalah **Kiai M. Ilyas Ruchiyat** (Rais Aam Syuriah PBNU), **Kiai Abdullah Faqih** (pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban Jatim), **Kiai Sahal Mahfudz** (pengasuh Pondok Pesantren Kajen Pati Jateng), **Kiai Abdullah Abbas** (pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon), **Kiai Idris Marzuki** (pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jatim), **Kiai M. Subadar** (pengasuh Pondok Pesantren Pasuruan Jatim), **Kiai Imron Hamzah** (Rais Syuriah PWNU Jatim), **Kiai Nurul Huda Jazuli** (pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri Jatim), **Kiai Ma'ruf Amin** (Katib Syuriah PBNU), **Kiai Fuad Hasyim** (pengasuh Pondok Pesantren Cirebon), **Kiai Imam Yahya Machrus** (pengasuh Pondok Pesantren Kediri Jatim), **Kiai Zainuddin Jazuli** (pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri Jatim), **Kiai Fakhruddin Masturo** (pengasuh Pondok Pesantren Sukabumi), dan **Kiai Turmudzi Badruddin** (Rais Syuriah PWNU NTB).

Dalam pertemuan tersebut juga membahas isu tentang adanya restu dari kiai sepuh kepada salah satu calon. Para kiai sepuh menyatakan kecewa dengan berbagai

selebaran yang saling menjatuhkan antar kandidat selama Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Untuk menjaga kemurnian Muktamar NU ke-30, para kiai tersebut menyerukan kepada semua pihak, baik kandidat maupun *muktamirin* (peserta muktamar) untuk kembali kepada *arruju' ila alhaq* (kebenaran), dan bertindak sesuai *al akhlaq ul karimah* (sikap mulia) secara ikhlas.

Konflik itu baru mencair setelah para kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siradj, Mustofa Bisri, dan Salahuddin Wahid mengadakan pertemuan tertutup di sebuah kamar di kediaman Kiai Idris Marzuki (Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri-Jatim). Dalam pertemuan tersebut, keempat kandidat Ketua Umum PBNU bersepakat akan mendukung siapapun yang menang dalam pemilihan. Dan, para kandidat akan mengingatkan para pendukungnya agar tidak mengumbar emosi dan tetap menjaga kebutuhan dalam tubuh NU.

3. Struktur Konflik

Dalam teori konflik terdapat 2 (dua) struktur konflik. Paul Conn membedakan struktur konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan struktur konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). (Surbakti, 1992:154).

Pertama, struktur konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri struktur konflik menang-kalah ini, tidak mungkin mengadakan kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja (pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedangkan pihak yang kalah akan

kehilangan semuanya) dan yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipil, seperti harga diri, iman kepercayaan, masalah hidup atau mati, dan jabatan penting pemerintahan.

Kedua, struktur konflik menang-menang ialah situasi konflik yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik menang-menang biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, dan bukan pula hal yang tidak penting. Namun, justru hal itu dianggap penting maka diadakan dialog, kompromi, dan kerja sama yang menguntungkan kedua pihak. Ciri struktur konflik menang-menang ini, yakni kompromi dan kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua pihak tetapi tidak secara maksimal.

Konflik politik yang terjadi antar tim sukses kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim termasuk struktur konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). Konflik ini memperebutkan jabatan strategis dan penting di NU, yaitu Ketua Umum PBNU 1999-2004 menggantikan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih menjadi Presiden RI ke-4.

Pada akhirnya, situasi konflik dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 terjadi kompromi dan kerja sama antara pihak Hasyim Muzadi dengan wakil dari 120 cabang NU di Aula Hotel Safari, Kediri-Jatim pada 24 Nopember 1999. Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumut, dan Bali.

Pertemuan itu terjadi setelah salah satu kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 Mustofa Bisri pada hari Rabu, 24 Nopember 1999 menegaskan penolakannya untuk memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Dan dia menyarankan *muktamirin* untuk memilih calon lain yang telah bersedia memimpin NU.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persoalan yang berhubungan dengan NU dan *power sharing* yakni, Hasyim Muzadi menawari Jabar untuk posisi wakil rais aam.

4. Tujuan Konflik

Menurut Surbakti (1992:155), bahwa dalam setiap situasi konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan. Dengan asumsi ini maka ada dua tujuan konflik yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama berupaya mendapatkan.
- b. Di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.

Dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim ada sepuluh pihak yang terlibat konflik, yaitu: Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siradj, Salahuddin Wahid, Ahmad Bagdja, Mustofa Bisri, M. Wahab, Husnan, Slamet Effendi Yusuf dan Fajrul Falaakh. Tujuan utama pihak yang terlibat konflik tersebut adalah mendapatkan jabatan sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004.

5. Intensitas Konflik

Menurut Surbakti (1992:156-158), bahwa intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi (ongkos) yang dikeluarkan dan tingkat keterlibatan partisipan dalam konflik dan dimensi lamanya konflik (*duration*).

Menurut Surbakti selanjutnya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas konflik dan *violence* (mengandung kekerasan) tidaknya suatu konflik politik ada dua yakni:

a. Faktor eksternal, yang meliputi:

1. Kondisi organisasi yaitu:

Apabila kelompok yang berkonflik tidak terorganisasikan secara sah maka kemungkinan konflik yang mengandung kekerasan semakin besar.

2. Stratifikasi sosial yaitu:

Apabila dari segi stratifikasi sosial ekonomi, pertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik mencakup pelbagai jenis, seperti orang desa, wong cilik, dan abangan yang berhadapan dengan orang kota, priyayi, dan santri maka konflik cenderung bersifat intens.

3. Kelas yaitu:

Apabila dari segi kelas yang mendominasi dan yang didominasi pertentangan itu mencakup pelbagai sektor, seperti kelas yang dominan di dalam negara, industri, partai, dan agama berhadapan dengan kelas yang mendominasi di dalam negara, industri, partai, dan agama maka konflik cenderung mengandung kekerasan.

4. Perubahan status yaitu:

Apabila yang bersangkutan menilai tidak mungkin terjadi peningkatan status bagi dirinya dan keturunannya maka konflik tidak saja cenderung intens, tetapi juga mengandung kekerasan.

b. Faktor internal, yang meliputi:

1. Besar-kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan yaitu:

Apabila kontestan yang terlibat konflik memandang sumber-sumber yang diperebutkan begitu besar artinya bagi dirinya maka kemungkinan terjadi konflik yang intens.

2. Besar-kecilnya risiko yang timbul dari konflik tersebut yaitu:

Apabila kontestan menilai sumber yang diperebutkan itu bermakna mendalam dan sangat penting bagi hidupnya maka konflik yang intens akan terjadi.

Pertarungan para kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, sebenarnya dimulai sejak 17 Nopember 1999 sampai dengan 25 Nopember 1999. Selama dalam waktu sembilan hari tersebut, pertarungan di mulai dengan gaya klasik dan sederhana, yakni membagi-bagi buku, kaus, stiker dan atribut-atribut lainnya. Kemudian persaingan semakin memanas dengan manuver politik silih berganti, bahkan rumor politik suap berembus. persaingan semakin sengit ketika setiap kandidat mencari dukungan dan minta restu ke kiai yang paling disegani di kalangan NU, yakni Kiai Abdullah Faqih (Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban-Jatim).

Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya telah keluar dari tradisi kaum *nahdliyyin*. Mereka mengedarkan selebaran yang sifatnya mengejek dan menghina calon lain.

Bunyi salah satu selebaran itu antara lain: “Pilihlah pemimpin NU yang tidak pernah masuk ke Gereja dan tidak pernah berbau Wababi”, di dalamnya terpampang foto Said Aqiel Siradj. Dan, di bagian lain tertulis tanda tangan dan komentar pembina Pesantren Lirboyo-Kediri, Kiai Maksum Jauhari. “Said Aqiel Siradj itu murid terkutuk di sini”, tulis Kiai Maksum Jauhari. Terang saja, hal itu membuat pendukung Said Aqiel Siradj mencak-mencak.

Tetapi, rupanya, perang antar kubu itu tidak juga berhenti. Bahkan, rumor politik suap kian kencang. Isu ini bermula dari *stand* mobil Timor. Pasalnya, anjungan mobil Timor yang berada di belakang arena Muktamar NU ke-30 itu “menghadiahkan” 18 mobil Timor kepada para kiai sepuh. Mobil dengan nomor khusus itu lantas mereka pakai selama Muktamar NU ke-30. Hasyim Muzadi yang dituding berada di balik pemberian hadiah itu mengelak.

Kendati begitu, ada beberapa perusahaan ikut “mensponsori” Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Kiai Hasyim Muzadi, misalnya, dituduh mendapat dukungan dana dari PT. Maspion dan panitia di Lirboyo-Kediri mendapat sumbangan yang cukup besar dari pabrik rokok keretek Gudang Garam, Kediri.

Para pendukung setiap kandidat mempunyai markas sendiri-sendiri di Kediri. Tim sukses Hasyim Muzadi menginap di Hotel Safari Jalan Welirang No. 19. Sementara, tim sukses Said Aqiel Siradj tinggal di Jalan Sahardjo No. 10.

Adapun kontestan yang terlibat dalam konflik pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 terdiri dari: Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 (Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj) dan tim sukses masing-masing kandidat (tim sukses Hasyim Muzadi terdiri dari: Chairul Anam, Matori Abdul Djilil, Effendy Choiri, panitia lokal

yang notabene dari Jatim dan Deny Danuri dari Poros Tengah yang dekat dengan Fuad Bawazier dan Amien Rais, sedangkan tim sukses Said Aqiel Siradj terdiri dari: A. Ghufron, kalangan muda NU yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pemuda dan Pelajar NU (IPPNU), dan para panitia nasional muktamar yang berasal dari Jakarta).

Sedangkan untuk melihat tingkat keterlibatan kontestan/pihak dalam konflik, dibagi menjadi dua, yakni: konflik internal antar kandidat Ketua Umum PBNU dan konflik internal antar kandidat Ketua Umum PBNU.

1. konflik internal antar kandidat Ketua Umum PBNU

Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim konflik internal antar kandidat Ketua Umum PBNU sangat tinggi, dibandingkan dengan konflik eksternal antar kandidat Ketua Umum PBNU. konflik internal antar kandidat Ketua Umum PBNU terjadi pada kubu Hasyim Muzadi dan kubu Said Aqiel Siradj.

Konflik internal antar kubu Hasyim Muzadi dan kubu Said Aqiel Siradj, selain diwarnai perang isu *money politics*, isu tidak adanya nasab kiai, membagi-bagi buku, kaus, stiker dan atribut-atribut lainnya. Juga diwarnai dengan perang klaim pendukung.

Lewat tim suksesnya, Hasyim Muzadi mengklaim telah mendapat dukungan cukup besar dari seluruh cabang di tanah air. Antara lain, Riau 3 cabang, Jambi 5 cabang, Sumsel 9 cabang dan 1 wilayah, Bengkulu 4 cabang dan 1 wilayah, Lampung 11 cabang dan 1 wilayah, Jabar 15 cabang, DKI Jakarta 2 cabang, Jateng 20 cabang, Yogyakarta 2 cabang, Jatim 40 cabang, Kalsel 3 cabang, Kalbar 3 suara, Kalteng 3

cabang, Kaltim 5 cabang, Sulut 7 cabang, Sulteng 3 cabang, Sulsel 8 cabang, Sultra 2 suara, Bali 8 suara, NTB 7 suara, NTT 8 suara, Maluku 3 suara, dan Irian Jaya 4 suara.

Sedangkan kubu Said Aqiel Siradj pada 23 Nopember 1999 juga mengklaim telah mendapat dukungan yang cukup besar dan optimis bisa menang. Berbeda dengan kubu Hasyim Muzadi yang berani mengungkapkan jumlah pendukung secara transparan, kubu Said Aqiel Siradj hanya mengungkapkan kekuatan dukungan dengan cara menyebutkan persentase, dengan alasan penyebutan jumlah dinilai tidak etis.

Adapun persentase dukungan yang dikumpulkan Said Aqiel Siradj adalah Jatim 10 %, Jateng 40 %, Jabar 70 %, Lampung 50-60 %, Jambi mendekati 100 %, Sumsel 30 %, Bengkulu 90 %, Sumut 60 %, Sumbar 50 %, Riau 50 % dan Kaltim 30 %. Kalteng 70 %, Kalbar 40 %, Kalsel 20 %, Sulteng hampir semua, Sulsel 60 %, Sulut 30 %, Maluku 30 %, Irian Jaya 20 %, NTB 40 %, dan NTT 40 %.

Menurut penulis adanya perbedaan pada Tabel 5.2 tentang Peta Kekuatan Kans Hasyim Muzadi dan Tabel 5.3 tentang Peta Kekuatan Kans Said Aqiel Siradj, karena beberapa alasan: *pertama*, penulis tidak merubah data yang sudah ada, hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian data dan keabsahan data. *Kedua*, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 tersebut menunjukkan strategi tim sukses Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj untuk memobilisasi kansnya dalam mensukseskan kandidatnya dalam merebut jabatan strategis di NU yakni Ketua Umum PBNU 1999-2004.

2. konflik eksternal antar kandidat Ketua Umum PBNU

Intensitas konflik eksternal antar kandidat Ketua Umum PBNU, yakni adanya pertentangan-pertentangan pada aspek stratifikasi sosial antar kandidat, seperti:

- a. Intelektual yaitu: Said Aqiel Siradj
- b. Manajerial yaitu: Hasyim Muzadi dan Ahmad Bagdja
- c. Berdarah biru yaitu Fajrul Falaakh, Salahuddin Wahid, dan M. Wahab.

Pertentangan-pertentangan yang menonjolkan pada aspek stratifikasi sosial tersebut, sangat tampak dalam pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, sehingga konflik antar kandidat semakin intens.

Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan Hasyim Muzadi dalam meraih jabatan Ketua Umum PBNU 1999-2004, kalau ditarik akan menghasilkan sebuah pemikiran baru yaitu: prespektif interaksionisme simbolik mengandung sejumlah “root imagers” atau ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut: *pertama*, Hasyim Muzadi selaku manusia telah melakukan interaksi, kegiatan tersebut adalah saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial, sehingga muncullah kelompok kiai nasib dan kiai prestasi dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU), di mana pada masa dulu organisasi NU hanya mengedepankan kiai nasab dalam kepemimpinan. *Kedua*, Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi non simbolis mencakup stimulus respon yang sederhana, seperti halnya bentuk untuk membersihkan tenggorokan seseorang, interaksionisme simbolik mencakup “penafsiran tindakan-tindakan”. *Ketiga*, objek-objek tidak mempunyai

makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, (a) objek fisik; (b) objek sosial; (c) objek abstrak.

Tindakan-tindakan Hasyim Muzadi dalam mencapai jabatan Ketua Umum PBNU 1999-2004, penulis membagi menjadi dua macam tindakan yakni, tindakan sebagai Ketua PWNU Jatim (1992-1997 dan 1997-2002) dan tindakan Pra Mukhtamar NU ke-30.

Adapun tindakan-tindakan Hasyim Muzadi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.11
Tindakan-Tindakan Hasyim Muzadi
Dalam Mencapai Jabatan Ketua Umum PBNU 1999-2004

No.	Tindakan-tindakan Hasyim Muzadi	
	Ketua PWNU Jawa Timur (1992-1997 dan 1997-2002)	Pra Mukhtamar NU ke-30
	Pembinaan ke dalam (<i>internal</i>)	
1.	Menata visi dan cara pandang para pengurus serta pimpinan NU dalam berorganisasi, yakni: a. Menyelenggarakan orientasi dan <i>taaruf</i> di Universitas Sunan Giri Surabaya pada 17 Januari 1993, b. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja I PCNU se-Jatim pada 26-27 September 1993 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Bettet, Pamekasan.	Peluncuran buku berjudul: KH. Hasyim Muzadi: " <i>Membangun NU Pasca Gus Dur</i> " (Dari Sunan Bonang sampai Paman Sam). a. Pada 17 Nopember 1999 di Jakarta. b. Pada 19 Nopember 1999 di Hotel Simpang Surabaya.

2.	PWNU Jatim melakukan renovasi kantor pengurus wilayah secara bertahap. <i>Pertama</i> , tahap awal di mulai sejak 1994 dan berakhir 1995 yakni pembangunan gedung belakang berlantai dua, dengan luas bangunan 250 m ² . Sedangkan tahap <i>kedua</i> , pembangunan gedung yang seluruh ruangnya ber AC, dengan biaya sekitar Rp. 550 juta di mulai awal 1996 berakhir pada bulan Nopember 1996.	Mengadakan pengajian bersama Isra' Mi'raj dan tasyakuran pasca Sidang Umum MPR, di Gedung Surabaya Indah antara PWNU Jatim dan DPW Muhammadiyah Jatim pada 14 Nopember 1999.
3.	Melakukan orientasi sampai ke tingkat cabang. Tujuannya, agar pengurus cabang dapat melaksanakan program dan mengkoordinir <i>jamiyyahnya</i> hingga ke tingkat ranting. Sehingga, hubungan timbal balik antara pengurus cabang dan pengurus wilayah terbina dengan baik.	Melakukan kampanye pers (<i>press campaign</i>) dengan Suara Pembaruan pada tanggal 15 Nopember 1999. Hasyim Muzadi menegaskan, jika dipercaya memimpin PBNU akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan, meskipun Presidennya adalah Gus Dur yang nota bene adalah 'orang NU'.
4.	PWNU Jatim membangun gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) NU Jatim yang berlantai tiga di atas tanah seluas 3.000 m ² , berlokasi di Ledok, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.	Menghadiri deklarasi ISNU (Ikatan Sarjana NU) di Surabaya pada 19 Nopember 1999, dalam kesempatan itu Hasyim Muzadi mengatakan NU sebagai <i>jam'iyah</i> akan tetap kritis dan proporsional terhadap seluruh kebijakan pemerintah, kendati Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah orang NU dan kebetulan masih menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
5.	Menekankan perlunya kesadaran berorganisasi dan menciptakan kemandirian NU pada saat turba ke daerah-daerah. Dan ini ditunjukkan dengan aktif dan rutin menyelenggarakan pertemuan antar pengurus, tidak hanya sebagai sarana konsolidasi, tetapi juga konsultasi dan pemecahan masalah di tingkat masing-masing. Sehingga, setiap persoalan yang menyangkut aspirasi politik bisa diminimalisir di antara para tokoh NU.	

6.	PWNU Jatim menyelenggarakan kegiatan spiritual berupa istighasah akbar membangun gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) NU Jatim yang berlantai tiga di atas tanah seluas 3.000 m ² , berlokasi di Ledok, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.	
7	Soliditas <i>nahdliyin</i> yang semakin kental di Jatim itu, dipertautkan dengan menggelar serangkaian kegiatan menyambut hari lahir NU ke-73. Selain bernuansa konsolidatif, penyempurnaan sarana dan prasarana, serta pengembangan wawasan Ilmiah.	
Pembinaan ke luar (<i>eksternal</i>)		
1.	Membuka akses dan jaringan dengan mitra asing, tidak cukup hanya menerima kunjungan. Tetapi juga melakukan kunjungan balasan ke luar negeri. Seperti, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Selain membawa misi organisasi untuk menjalin kerja sama internasional, juga untuk mengamati langsung kondisi riil suatu negara beserta isu-isu strategis yang mengelilinginya.	
2.	Aktif menjalin dan membina hubungan dengan berbagai pihak di Jatim. Mulai dari pejabat Pemprov Jatim, Pangdam Brawijaya, tokoh orsospol, hingga tokoh-tokoh dari semua agama.	
3.	Dalam bermitra dengan kalangan orsospol, PWNU Jatim mengacu pada parameter seperti yang digariskan dalam khittah dan tidak saling intervensi di dalamnya.	
4.	Dalam konteks go global, Hasyim Muzadi juga menjalin hubungan kemitraan dengan tokoh-tokoh luar negeri, khususnya kalangan diplomat dari kedutaan-kedutaan besar negara sahabat dan LSM.	

Sumber:

1. **Baidlawi, Masduki dkk**, (1999). *H.A. Hasyim Muzadi: Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo, hal. xxiii-xxvi, dan hal. xxx-xxxii.
2. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi*

pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000. Malang: eKapim, hal. xxx-xxxii, hal. 6-8, dan hal. 13.

Dalam kesempatan yang sama, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan Hasyim Muzadi tersebut, *Charron* mengemukakan secara lebih jelas inti pandangan teori interaksionisme simbolik yaitu: *Pertama*, individu bukanlah merupakan kepribadian yang terstruktur dan konsisten, seperti halnya seorang aktor yang selalu berubah dan dinamis yang tidak pernah menjadi apa-apa, tetapi selalu siap menjadi segala sesuatu, terbuka dan bertindak. Individu tidak disosialisasikan, tetapi selalu dalam proses sosialisasi. Individu tidak dibentuk atau baku, tetapi melakukan perubahan secara konstan dalam proses interaksi. *Kedua*, masyarakat dan kelompok tidak dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang statis “di luar sana” yang mempengaruhi, tetapi keseluruhannya merupakan proses interaksi yang dinamis dan berubah secara konstan. *Ketiga*, ciri individu adalah memiliki pikiran dan dirinya sendiri, dan kedua ciri tersebut merupakan sebuah proses. Orang tidak memiliki “pikiran” sebanyak dia memiliki “proses pemikiran”, mengartikan kemampuan untuk berbicara dengan diri sendiri, kemampuan untuk mengambil rangsangan secara selektif dari alam, memperkirakan kepentingannya, menginterpretasikan situasi, menilai tindakan orang lain dan tindakannya sendiri. *Keempat*, manusia memiliki banyak “diri sendiri”, masing-masing berhubungan dalam interaksi di mana dia terlibat, masing-masing berubah secara konstan dalam proses interaksi. *Kelima*, kebenaran, ide, sikap dan perspektif, semua dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses yang dinilai dan berubah oleh organisme berkaitan dengan apa yang dia amati.

Orang tidak dikondisikan untuk menguji kebenaran mereka. Kebenaran datang melalui interaksi dan berpindah dalam proses interaksi, sebagaimana terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri.

Di samping itu, terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebagaimana yang dikatakan Craib, telah memenuhi empat tuntutan atau *prasyarat fungsional* adalah sebagai berikut: *Pertama*, Hasyim Muzadi telah menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*adaptation*). *Kedua*, Hasyim Muzadi memiliki alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat mencapai tujuan-tujuannya sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 dan demikian mencapai gratifikasi (*goal attainment*). *Ketiga*, Hasyim Muzadi mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagiannya dan membangun cara-cara yang berpautan dengan deviansi, dengan kata lain Hasyim Muzadi mempertahankan kesatuannya (*integration*). *Keempat*, Hasyim Muzadi mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan seimbang (*Latent Pattern Maintenance*). (Craib, 1992:65-66).

Dari proses pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 tersebut, maka penulis dapat memberikan analisis bahwa terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri, tidak lagi mengedepankan nasab kiai, tetapi lebih mengedepankan prestasi. Adapun prestasi Hasyim Muzadi yakni: *Pertama*, Sebagai ketua PWNU Jatim, Hasyim berhasil secara signifikan menggerakkan kepengurusan NU Jatim hingga badan-badan otonomnya. *Kedua*, pada pemilu 1999 lalu, Jatim menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional. *Ketiga*, Hasyim sukses dua kali memimpin NU Jatim periode 1992-

1997 dan periode 1997-2002. (Aula, 1999:29-30). *Keempat*, Hasyim Muzadi juga mampu membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan (*jamiyyah ijtimaiyyah diniyah*) yang mandiri dan sekaligus mampu memberikan pencerahan dalam pengelolaan organisasi secara profesional. (Baidlawi, 1999:xvii). Ini bisa dilihat, meningkatnya wawasan organisasi para pengurus dan kadernya, berikut kemampuan dalam melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif, dalam bingkai semangat mengedepankan kebaikan umat (*mabadi' khaira ummah*).

Untuk melihat lebih jauh prestasi Hasyim Muzadi sehingga terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.12
Prestasi Hasyim Muzadi

No.	Prestasi Hasyim Muzadi
1.	Sukses dua kali memimpin NU Jatim periode 1992-1997 dan periode 1997-2002.
2.	Sebagai ketua PWNU Jatim, Hasyim berhasil secara signifikan menggerakkan kepengurusan NU Jatim hingga badan-badan otonomnya dan mampu membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan (<i>jamiyyah ijtimaiyyah diniyah</i>) yang mandiri dan sekaligus mampu memberikan pencerahan dalam pengelolaan organisasi secara profesional.
3.	Pada pemilu 1999, Jatim menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional.
4.	Hasyim Muzadi merupakan kader NU yang langka. Disebut langka, karena ia benar-benar aktif di NU mulai dari tingkatan paling bawah, sebagai ketua Ranting NU Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, lalu merangkak menjadi Ketua Cabang NU Kota Malang, Ketua Ranting GP Ansor Bululawang Malang, Ketua Ancab GP Ansor Bululawang Malang, Ketua cabang GP Ansor Malang, Ketua PW GP Ansor Jatim, salah satu Ketua GP Ansor sampai menjadi Ketua PWNU Jatim hingga menjadi Ketua Umum PBNU. Hasyim juga terjun ke organisasi sosial-politik. Ia mengawalinya dengan menjadi Ketua Ranting Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dinoyo, kemudian menjadi Ketua Fraksi PPP Malang. Kedudukan itu mengantarnya menjadi anggota DPRD I Jawa Timur.

5. Pengalaman jabatan Hasyim Muzadi:
 - a. Ketua PMII Cabang Malang (1969-1973).
 - b. Ketua Departemen Dakwah PMII (1970).
 - c. Anggota DPRD Tk. II Malang dari PPP (1972-1982).
 - d. Anggota DPR I Jawa Timur (1984-1987).
 - e. Ketua PP GP. Ansor (1985-1990).
 - f. Ketua Ansor Jawa Timur (1986).
 - g. Sekretaris PWNU Jawa Timur (1989).
 - h. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur (1990-1992).
 - i. Ketua PWNU Jawa Timur (1992-1997) dan (1997-2002, berjalan sampai 1999).
 - j. Ketua Umum PBNU (1999-2004).

Sumber:

5. **Baidlawi, Masduki dkk**, (1999). *H. A. Hasyim Muzadi Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo, hal. 140.
6. **Aula**, (1999). *Wawancara dengan KH. Hasyim Muzadi: Prioritas Utama, NU Luar Jawa*. Surabaya: PWNU Jatim, No. 10 Tahun XXI, Romadlon 1420, hal. 29-30.
7. **FORUM Keadilan: K.H. Hasyim Muzadi: "Waktu Orde Baru, NU adalah Golkar Jilid Satu"**, No. 35, 5 Desember 1999, hal. 19.
8. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: elKapim, hal. 49-52.

Terpilihnya Hasyim Muzadi bukan kiai nasab sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim karena prestasi dan profesionalismenya di NU, sehingga penulis memberikan julukan kepada Hasyim Muzadi dalam penelitian ini sebagai "KIAI NASIB".



BAB VI PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam rekrutmen kepemimpinan PBNU pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, setelah penulis melakukan analisis di peroleh kesimpulan berupa temuan pokok sebagai berikut:

Tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi menitik beratkan pada prestasi dan profesionalisme seorang kandidat Ketua PBNU 1999-2004. Hal ini disebabkan kondisi yang menguntungkan Hasyim Muzadi yakni: *pertama*, dengan runtuhnya Orde Baru dan berganti dengan Orde Reformasi hasil pemilu 1999, dapat dipandang sebagai peluang untuk melakukan perubahan-perubahan disegala bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya maupun perubahan sistem sosial baru ke arah yang lebih adil dan demokratis. Demikian juga pada NU, melakukan perubahan-perubahan rekrutmen kepemimpinan PBNU pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, yang tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi menitik beratkan pada prestasi dan profesionalisme seorang kandidat Ketua PBNU 1999-2004. *Kedua*, dasar nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam perjuangan dan kiprah Nahdlatul Ulama yakni: kemerdekaan (*al-hurriyyah*), keadilan (*al-'adalah*), demokrasi (*asy-syura*), dan kesamaan posisi (*al-musawa*), dan nilai toleransi (*at-tasamuh*), serta dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, maka Mukhtamar NU ke-30 sebagai forum permusyawaratan tertinggi *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama menyumbangkan

gagasan dan usulan dalam rangka pembaharuan Indonesia pada umumnya dan rekrutmen kepemimpinan NU khususnya. *Ketiga*, munculnya tokoh pembaharu NU antara lain: KH. Achmad Siddiq, KH. Abdul Muchit Muzadi, KH. MA. Sahal Mahfudz, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqiel Siradj, dan Masdar F. Mas'udi. Dari pemikiran merekalah, para *nahdliyin* dapat menemukan pencerahan pemikiran, utamanya dalam masalah keagamaan, serta tampilnya tokoh-tokoh dari generasi muda seperti Ulil Abshar Abdalla, Jadul Maula, Zuhairi Misrawi serta generasi seangkatan dengan mereka adalah buah dari progresifitas pemikiran para tokoh NU tersebut. Kondisi-kondisi yang menguntungkan inilah, maka Hasyim Muzadi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam rekrutmen kepemimpinan PBNU pada Muktamar NU ke-30 di Larboyo-Kediri-Jatim, yang tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi menitik beratkan pada prestasi dan profesionalisme seorang kandidat Ketua Umum PBNU.

Restu kiai sepuh dan dukungan tujuh PWNU secara terbuka yakni: PWNU Jatim, PWNU Bali, PWNU NTB, PWNU Kalteng, PWNU Kalsel, PWNU Sulut dan PWNU Irian Jaya. Dukungan tujuh PWNU secara terbuka tersebut sebagai bukti pengakuan terhadap dedikasi Hasyim Muzadi selama menjabat Ketua PWNU Jatim yakni: *Pertama*, berhasil secara signifikan menggerakkan kepengurusan NU Jawa Timur hingga badan-badan otonomnya. *Kedua*, pada pemilu 1999 Jawa Timur menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional. *Ketiga*, sukses dua kali memimpin NU Jawa Timur (1992-1997 dan 1997-2002). *Keempat*, Hasyim Muzadi juga mampu membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan (*jamiyyah ijtumariyah diniyah*) yang mandiri dan sekaligus mampu memberikan

pencerahan dalam pengelolaan organisasi secara profesional. *Kelima*, PWNU Jatim dibawah kepemimpinan Hasyim kinerjanya semakin baik dan memiliki karakteristik organisasi yang jelas, dari aspek manajerial PWNU Jatim dikelola lebih profesional, kerja kejamiiyahan lebih diutamakan dan berusaha menghindari keterlibatan secara vulgar dengan dunia politik, dan program kerja organisasi tersusun rapi, dengan wawasan jauh ke depan.

Hasyim Muzadi merupakan kader NU yang benar-benar aktif di NU sejak di ranting hingga menjadi Ketua Umum PBNU yakni: dimulai dari,

1. Ketua PMII Cabang Malang (1969-1973).
2. Ketua Departemen Dakwah PMII (1970).
3. Ketua PP GP. Ansor (1985-1990).
4. Ketua Ansor Jawa Timur (1986).
5. Sekretaris PWNU Jawa Timur (1989).
6. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur (1990-1992).
7. Ketua PWNU Jawa Timur (1992-1997) dan (1997-2002, berjalan sampai 1999).
8. Ketua Umum PBNU (1999-2004).

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat implikasi ke depan bagi NU yakni, rekrutmen kepemimpinan PBNU harus semakin terbuka, yakni kandidat Ketua Umum PBNU tidak lagi hanya berasal dari kiai nasab saja, tetapi kandidat yang berprestasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi bisa mengikuti rekrutmen kepemimpinan PBNU.

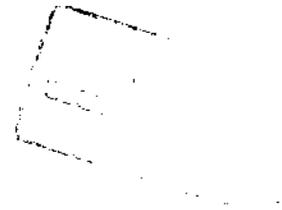
6.2. Saran

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa telah terjadi perubahan dalam rekrutmen kepemimpinan PBNU pada saat Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri, yakni tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi menitik beratkan pada prestasi dan profesionalisme seorang kandidat Ketua PBNU 1999-2004. oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Sudah saatnya NU dalam rekrutmen kepemimpinan PBNU kedepan, tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi menitik beratkan pada prestasi dan profesionalisme seorang kandidat Ketua PBNU.
2. Sudah saatnya NU dalam rekrutmen kepemimpinan PBNU kedepan, tidak lagi mengutamakan unsur kedaerahan seorang kandidat Ketua PBNU.
3. Sudah saatnya NU dalam rekrutmen kepemimpinan PBNU kedepan, mempertimbangkan kemampuan bersikap kritis dan independen seorang kandidat Ketua Umum PBNU terhadap pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anam, Choirul**, (1999). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu.
- Baidlawi, Masduki dkk**, (1999). *H.A. Hasyim Muzadi: Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo.
- Brannen, Julian**, (2002). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Samarinda: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari.
- Bruinessen, Martin Van**, (1999). *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Craib, Ian**, (1992). *Teori-teori Sosial Modern: Dari Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali.
- Haidar, M. Ali**, (1998). *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasil-hasil Muktamar KE-29 NU**, (1994). Jakarta: PBNU.
- Hasil-hasil Muktamar XXX NU**, (2000). Jakarta: PBNU.
- Hayat, Sholeh dkk**, (2002). *Pedoman Organisasi dan Administrasi Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PWNNU Jawa Timur.
- Johnson, Doyle Paul**, (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid II, Jakarta: Gramedia.
- Kirk, Jerome dan Miller, March L**, (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica**, (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lauer, Robert H.**, (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim),** (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: elKapim.
- Moesa, Ali Maschan,** (2002). *NU, Agama dan Demokrasi*. Surabaya: Pustaka Da'i Muda.
- Moleong, Lexy J.,** (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nahid, Abu dkk.** (1992). *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. Surabaya: Yayasan Majalah Aula Jawa Timur.
- Nasikun,** (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S.,** (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pedoman Organisasi dan Administrasi Nahdlatul Ulama,** (2002), Surabaya: PWNU Jatim.
- Poloma, Margaret M.,** (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qomar, Mujamil,** (2002). *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Ritzer, George,** (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali.
- Salim, Agus,** (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian, Effendi,** (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Evendby M.,** (1989). *Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang Berhasil*. Jakarta: Rajawali.
- Soeprapto, R. Riyadi,** (2002). *Interaksionisme Simbolik*. Malang: Averroes Press.
- Sunarto, Kamanto,** (2000). *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni.,** (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, Ramlan,** (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Ulum, Bahrul**, (2002). *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?*. Jejak langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik. Djogjakarta: Ar-Ruzz Press.
- Zamroni**, (1992). *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Zeitlin, Irving M**, 1(998). *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. KORAN/MAJALAH/MAKALAH

Aula, Februari 2003

Aula, No. 10 Tahun XXI, 1999.

Duta Masyarakat, 1 Oktober 2002.

Duta Masyarakat, 11 Oktober 2002.

Duta Masyarakat, 12 Oktober 2002.

Duta Masyarakat, 16 Oktober 2002.

FORUM Keadilan, No. 35, 5 Desember 1999.

Jawa Pos, 21-27 Nopember 1999.

Jawa Pos, 27 Oktober 2002.

Kompas, 26 Juli 2002.

Kompas, 27 Nopember 1999.

Kompas, 5 Januari 2002.

Pesantren, No. 3/Vol.V/1988.

Radar Kediri, 25 Nopember 1999.

Surya, 23 Nopember 1999.

Surya, 26 Nopember 1999.

Surya, 27 Nopember 1999.

C. INTERNET

(<http://buletin.hypermart.net/edisi6/kritik.htm>).

([http://members.tripod.com/aljawad/buletinew/edisi ke 11.htm](http://members.tripod.com/aljawad/buletinew/edisi%20ke%2011.htm)).

(<http://www.ngo.or.id/lakpesdam/profil.htm>).

<http://www.kmnu.org/pustaka/buku3/antar.txt> Yogyakarta, November 1994.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Adnan, Moh. (2000). *NU dan Civil Society: Kecemasan Faksi Kultural Generasi Muda NU Surabaya Terhadap Dinamika NU Pasca Muktamar Ke-30 di Lirboyo*. Skripsi, Surabaya: FISIP-UNAIR.

Koffah. (1990). *Perilaku Politik NU: Studi Tentang Keterlibatan NU dalam Partai Politik Tahun 1945-1984*. Skripsi, Surabaya: FISIP-UNAIR.

Mahbub, Moh. (1998). *Kiprah Politik NU Pasca Khittah Studi Hubungan NU dengan Negara (dalam Perspektif State and Civil Society)*. Tesis, Surabaya: UNAIR.